KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KH. A. WAHID HASYIM

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

Achmad Afandi

NIM. F02316045

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Achmad Afandi
NIM	: F02316045
Program	: Magister (S-2)/PAI
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sunguh-sunguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D7EC4AFF546599521
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Afandi

NIM : F02316045

PERSETUJUAN

Tesis achmad Afandi ini telah disetujui

pada tanggal 9 Januari 2019

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Abd. Kadir, MA

NIP. 195308031989031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Achmad Afandi ini telah diuji

Pada tanggal 07 Pebruari 2019

Tim Penguji :

1. Dr. H. Hanun Asrohah, M.Ag (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag (Penguji Utama) .....
3. Dr. H. Abd. Kadir, MA (Pembimbing/Sekretaris) .....

Surabaya,

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 19600412 1994033 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD AFANDI
NIM : F02316045
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
E-mail address : mafandi36@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KH. A. WAHID HASYIM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2019

Penulis

(ACHMAD AFANDI)

ABSTRAK

Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pada Masa KH. Abdul Wahid Hasyim.

Oleh: Achmad Afandi

Kata Kunci : *Pendidikan Islam, Kebijakan Kementerian Agama, KH. Abdul Wahid Hasyim*

Pendidikan Islam mengalami perkembangannya dengan secara terbuka terjadi ketika Republik Indonesia telah mengalami kemerdekaan. Dibentuknya kementerian agama adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap umat Islam. Kebijakan-kebijakan terkait pendidikan Islam pun mulai banyak dicanangkan tidak terkecuali pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim. Banyak kebijakan yang dibuat beliau terkait pendidikan Islam selama menjabat menteri agama. Kebijakan tersebut dibuat semata-mata demi berkembangya pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui kebijakan kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim. 2. Untuk mengetahui langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pengembangan pendidikan Islam. 3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim dengan pengembangan pendidikan Islam masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan. Rumusan serta isi dari kebijakan yang menjadi inti pembahasan. Data diperoleh melalui studi pustaka yang bersifat mendalam dan menyeluruh. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif-analisis, yakni dengan memberikan gambaran secara utuh tentang kebijakan dalam pengembangan pendidikan Islam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisi isi (*analysis content*) berdasarkan konsep dan prinsip pendidikan Islam. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan.

Adapun kesimpulan yang berhasil dirumuskan berdasarkan fokus penelitian. Paparan data dan temuan serta analisis pembahasan, adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan yang pernah dibuat oleh KH. Abdul Wahid Hasyim terkait pengembangan pendidikan Islam sebagai berikut: a. Penyeimbangan ilmu agama dan umum, b. Berdirinya PTAIN, c. Berdirinya SGAI. 2. Implikasi kebijakan KH. Abdul Wahid Hasyim dengan masa sekarang adalah banyak kebijakannya yang masih sesuai dengan masa sekarang dan ada juga yang mengalami perubahan kearah kemajua, seperti: saat ini pendidikan karakter yang lagi digalakkan oleh pemerintah yang mana pendidikan agama lah yang mempunya peran penting dalam mendidik karakter siswa. STAIN yang banyak fakultas agamanya bertransformasi menjadi IAIN dan UIN dengan keilmuan yang luas dan umum. SGAI yang setara dengan Sekolah Menengah Atas sekarang berpindah ke Fakultas Tarbiyah jika ingin menjadi guru agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

TRANSLITERASI vi

MOTTO ix

ABSTRAK x

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... ….1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... ….6

C. Rumusan Masalah ..... ….8

D. Tujuan Penelitian..... ….9

E. Manfaat Penelitian..... ….9

F. Kerangka Teoritik ..... ….10

G. Penelitian Terdahulu..... ….13

H. Metode Penelitian..... ….14

I. Sistematika Pembahasan ..... ….21

BAB II KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama..... …23

B. Kebijakan Kementerian Agama

1. Pengertian Kebijakan…….....26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Periodesasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan Islam
a) Kebijakan Masa Penjajahan Belanda…… 29
b) Kebijakan Masa Penjajahan Jepang ……..... 32
c) Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan Islam ……..34
C. Pendidikan Islam
1. Pengertian Pendidikan Islam ..... …38
2. Dasar-dasar Pendidikan Islam ..... …42
3. Tujuan Pendidikan Islam..... …46
4. Pendidikan Islam di Indonesia ..... …49
BAB III BIOGRAFI MENTERI AGAMA KH. ABDUL WAHID HASYIM
A. Latar Belakang Keluarga..... …55
B. Riwayat Pendidikan ..... …57
C. Aktivitas Organisasi
1. Perjuangan di NU ..... …60
2. Perjuangan di Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)…….62
3. Perjuangan di Masyumi ..... …64
D. Pemikiran-Pemikiran KH.Abdul Wahid Hasyim
1. Bidang Pendidikan..... …66
2. Bidang Politik ..... …69
3. Bidang Tentang Agama ..... …72
BAB IV KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KH. ABDUL WAHID HASYIM
A. Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pada Masa KH. Abdul Wahid Hasyim
1. Menyeimbangkan Ilmu Agama dan Umum..... … 76
2. Berdirinya Sekolah Guru Agama Islam ..... … 78
3. Berdirinya PTAIN ..... … 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Mengembangkan Pendidikan Islam
1. Reformasi Pendidikan di Pesantren Tebuireng ..... … 81
2. Pelaksanaan Pengajaran Agama di Sekolah ..... … 86
3. Langkah-langkah Dalam Mendirikan PTAIN ..... … 87
4. Pelaksanaan SGAI 90
C. Implikasi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pengembangan Pendidikan Islam Masa Sekarang.
1. Implikasi dari Penyeimbangan Ilmu Agama dan Umum … 93
2. Implikasi dari Didirikannya SGAI..... 96
3. Implikasi dari Didirikannya PTAIN 99

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikan negara tersebut. Untuk itu, pendidikan dianggap sebagai suatu aset yang penting bagi sebuah bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan akan menjadi sumber daya manusia yang handal pada bidangya. Melalui pendidikan pula, sebuah negara dapat membangun dan memperbaiki negaranya.

Di dalam dasar negara disebutkan, bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 31 UUD 1945. Di dalamnya juga disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan dasar rakyat Indonesia. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab pembiayaan untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), begitu juga pemerintah daerah bertanggung jawab sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).[1]

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, negara memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan warga negara Indonesia, dan negara tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi terhadap warga negara, agar pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan dapat

[1] Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana. Pemerintah membiayai pendidikan dasar selama 9 tahun yang meliputi SD/MI serta SMP/MTs. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ikut andil dalam pembiayaan pendidikan.

Terlaksananya pendidikan tentulah tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Hal ini didasari atas pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan usaha terstruktur untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia melalui usaha mencerdaskan kehidupan bangsa hendaknya terus-menerus dibangun agar akhirnya tercapai tujuan yang diharapkan bersama. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki tingkat keintelektualan yang memadai untuk dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Negara dalam hal ini perlu sekiranya memperhatikan aspek pendidikan bagi masyarakat, misalkan membangun lembaga pendidikan yang maju dan modern dengan tenaga pendidik yang professional, sehingga lulusannya nanti dimungkinkan bisa bersaing di dalam maupun di luar negeri. Karena bagaimanapun juga jika masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang cukup serta pengetahuan yang memadai maka pola berfikirnya pasti akan berkembang juga sehingga tujuan awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar bisa terwujud.

Lebih lanjut, agar pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa,[2] maka proses yang berlangsung dalam dunia pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada manusia akan potensi "kemanusiaan" yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun rasional.

Selain itu, kecerdasan tersebut harus mampu memberi stimulus kepada manusia untuk memanfaatkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Tata nilai kemanusiaan yang dimaksud ialah tetap memperhatikan nilai-nilai moral, seperti nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

Upaya pemerintah untuk pembangunan pelayanan pendidikan memang terlihat melalui langkah-langkah yang diambilnya, seperti penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan keinginan masyarakat yang ingin mendalami agama namun dengan tetap meninggikan keinginannya mengenyam pendidikan, maka pemerintah yang dalam hal ini kementerian agama, menganggap perlu dihadirkannya pendidikan Islam.

---

[2] Muhammad Idrus, "Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam", *El-Tarbawi*, Vol. 1 (September, 2014), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak berkembangnya Islam pada masa awal, masyarakat muslim Indonesia telah memprioritaskan masalah pendidikan. Mereka menganggap antara pendidikan dan keislaman haruslah ditempuh selaras. Hal tersebut mendorong masyarakat muslim untuk melaksanakan pendidikan dan juga wawasan keislaman meskipun dengan cara yang sederhana. Mereka antusias melaksanakan pendidikan Islam kendati dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla maupun di rumah-rumah ulama. Kehausan akan pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan merubah lembaga keagamaan dan sosial yang ada ke dalam lembaga pendidikan Islam.

Pendidikan Islam terus berkembang hingga pemerintah mulai memperhatikan antusiasme masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Islam. Berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran kementerian agama dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan untuk mengembangkan pendidikan Islam. Kementerian Agama dalam hal ini, memiliki tugas suci sebagai penentu kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.[3]

Setiap menteri agama yang sedang menjabat membawa inovasi-inovasi nya untuk pengembangan pendidikan Islam. Dalam pembahasan masalah kebijakan pendidikan, penulis mengangkat tokoh menteri agama

[3] Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjabat pada masanya yang memiliki inovasi-inovasi dalam pendidikan Islam tokoh tersebut adalah KH. Abdul Wahid Hasyim.

Namun, jabatan menteri agama pertama kali di Indonesia diemban oleh H. M. Rasjidi yang dipilih oleh pemerintah dalam menahkodai kementerian agama. Pada masa H. M. Rasjidi merupakan masa awal berdirinya kementerian agama jadi masih banyak pembenahan di dalam tubuh kementerian agama sendiri. Kebijakannya terkait dengan pendidikan Islam adalah adanya konsolidasi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang kementerian agama. Konsolidasi tersebut yakni mengambil alih beberapa bidang tugas yang sebelumnya ditangani oleh kementerian-kementerian lain. Sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 5/SD tanggal; 25 Maret 1946, Menteri Agama Rasjidi mengambil alih tugas-tugas keagamaan dari beberapa kementerian diantaranya, dari kementerian P&K yang berkaitan dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah.[4]

Sedangkan masa KH. Abdul Wahid Hasyim saat menjabat menjadi menteri agama, salah satu kebijakan yang fenomenal adalah mengeluarkan peraturan pemerintah tanggal 20 Januari 1950, yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum, baik negeri maupun swasta.[5] Hal ini menjadi sesuatu yang tabu karena pendidikan umum dan pendidikan Islam seolah terdapat tembok

[4] Azyumardi Azra, "H.M. Rasjidi BA: Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI, 1998), 8.
[5] Fendi T. Cahyono, "Kebijakan Menteri Agama K. H. Wahid Hasyim terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia", *Al Achyad: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1 (September 2016), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar yang memisahkan keduanya. Namun KH. Abdul Wahid Hasyim berusaha untuk mempertemukan dengan cara memadukan pelajaran umum kedalam kurikulum lembaga pendidikan Islam. Dan juga masa KH. Abdul Wahid Hasyim awal mula didirikannya perguruan tinggi Islam negeri (PTAIN) serta Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) meskipun masih masa-masa awal berdirinya kementerian agama, namun pemikiran beliau sangat maju dan modern. Kementerian agama melalui PTAIN diharapkan mampu mencetak kader-kader disamping menguasai ilmu agama juga harus mampu menguasai ilmu umum sebagai tantangan zaman dikemudian hari.

Majunya kementerian agama yang sekarang ini adalah juga hasil dari buah pemikiran serta kebijakan menteri-menteri agama sebelumnya termasuk KH. Abdul Wahid Hasyim, kebijakan beliau masih diterapkan untuk masa yang sekarang karena masih sesuai dengan kebutuhan zaman modern sekarang ini. Dari ulasan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pada Masa KH. Abdul Wahid Hasyim".*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pentingnya pendidikan Islam sebagai upaya pemerintah dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak.
b. Perlu adanya pembahasan kurikulum pendidikan Islam setelah Indonesia merdeka karena yang dijalankan adalah warisan para penjajah.
c. Mata pelajaran agama Islam hanya diajarkan di madrasah dan pondok pesantren sehingga kurang meratanya pendidikan agama terutama di sekolah umum.
d. Pentingnya kader guru agama yang mampu memajukan pendidikan keagamaan selain memahami ilmu agama dituntut juga memahami ilmu umum.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada bentuk kebijakan-kebijakan yang pernah di putuskan oleh Kementerian Agama dalam mengembangkan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah berfungsi sebagai penyempit obyek yang akan diteliti agar tidak melebar luas. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur dalam pembatasan masalah meliputi:

Pertama, kebijakan yang dimaksud dalam tesis ini adalah upaya kementerian agama dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui aturan-aturan yang telah di buat di pemerintahan. Pembuatan kebijakan ini di pimpin oleh KH. Abdul Wahid Hasyim selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menteri agama. Kebijakan kementerian agama ini diharapkan mampu membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih maju dan berkualitas sesuai tuntunan zaman.

Kedua, Pengembangan pendidikan Islam yang dimaksud adalah pengembangan yang dilakukan oleh kementerian agama masa KH. Abdul Wahid Hasyim tentang kurikulum pendidikan Islam yakni adanya pelajaran agama di sekolah negeri/umum, dan tentang kelembagaan yakni berdirinya PTAIN di Jogjakarta, dan diadakannya sekolah guru agama Islam (SGAI) yang selanjutnya berubah nama menjadi pendidikan guru agama (PGA).

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam masa KH. Abdul Wahid Hasyim ?
2. Bagaimana langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam mengembangkan pendidikan Islam ?
3. Bagaimana keberlanjutan kebijakan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim dengan pengembangan pendidikan Islam masa sekarang ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim.
2. Langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pengembangan pendidikan Islam.
3. Keberlanjutan kebijakan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim dengan pengembangan pendidikan Islam masa sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

   Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori tentang pendidikan Islam di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian-penelitian berikutnya yang masih berhubungan dengan topik penelitian ini.

2. Adapun secara praktis,hasil penelitian ini diharapkan:

   a. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis terkait segala tentang kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

b. Bagi Kementerian Agama, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan kedepanya yang terkait dengan pengembangan pendidikan Islam.

c. Bagi pihak lain yang membaca tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, ataupun sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

F. Kerangka teoritik

Teori merupakan pedoman yang digunakan untuk mempermudah jalannya penulisan serta sebagai pegangan pokok bagi seorang peneliti. Dan teori merupakan salah satu sumber bagi peneliti untuk digunakan sebagai analisis dalam memecahkan suatu masalah penelitian.[6]

Disini penulis menggunakan teori *Continuity and Change*. Teori *Continuity and Change* (kesinambungan dan perubahan) teori ini dikemukakan oleh John Obert Voll, menurutnya peristiwa dalam dunia adalah bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi atau muncul didunia. Peristiwa itu merupakan bagian dari evolusi pengalaman yang rentang waktunya sangat panjang hingga menjadi modern, yang dasar-dasarnya telah

[6] Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penelitian Skripsi* (Jakarta: Liberty, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan pada abad dan masa sebelumnya. Lebih jelasnya dengan memakai teori *Continuity and Change* John Obert Voll menjelaskan bahwa kelompok Islam mengalami perubahan ke era modern dikarenakan menghadapi berbagai tantangan perubahan yang dialami.[7]

Kementerian Agama dalam hal ini adalah sebuah jawaban dimana sebelumnya urusan keagamaan dikesampingkan oleh pemerintahan kolonial, sedangkan setelah kemerdekaan pemerintah mendirikan kementerian agama sebagai kebutuhan masyarakatnya.

Bidang garapan kementerian agama termasuk di dalamnya mengurusi pendidikan Islam. Pendidikan Islam mengalami banyak perubahan setelah Indonesia merdeka contohnya jika zaman kolonial banyak peraturan yang mengekang penyebarluasan pendidikan Islam, maka setelah Indonesia merdeka peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Pendidikan Islam pun lebih modern lagi dimana yang asalnya hanya diajarkan di lembaga pesantren dan madrasah-madrasah kini sekolah umum pun juga wajib mendapatkan materi pelajaran agama. Begitu juga dengan madrasah dan pesantren kini ilmu umum pun juga diajarkan di dalamnya padahal dulu pesantren hanya mengajarkan ilmu agama kepada santrinya, namun seiring berkembangnya zaman serta dengan berbagai tantangan dunia modern lembaga keagamaan lama-kelamaan menyesuaikannya. Dan semua itu masuk dalam peraturan serta kebijakan kementerian agama di Indonesia

[7] John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian lahi Pers, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa KH. Abdul Wahid Hasyim yang juga masih mempunyai kesinambungan sampai saat ini.

Kebijakan KH. Abdul Wahid Hasyim selama menjabat menteri agama terkait dengan pendidikan Islam adalah *pertama* kurikulum, yakni masuknya pelajaran umum seperti bahasa Inggris, bahasa belanda, matematika dan lain-lain, untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. *Kedua* tentang lembaga Islam, di dirikannya perguruan tinggi Islam negeri (PTAIN) untuk menjawab tantangan zaman yang semakin modern karena khazanah keislaman akan berkembang pesat jika diajarkan di perguruan tinggi. Terkait dengan lembaga juga bahwa masa KH. Abdul Wahid Hasyim ada sekolah khusus bagi guru agama Islam (SGAI).

Dengan demikian penelitian ini sesuai jika memakai teori *Continuity and Change* yang di gagas John Obert Voll. Di satu sisi semua kebijakan tersebut masih berkesinambungan di zaman modern sekarang ini, di sisi lain juga terdapat perubahan-perubahan terkait kebijakan tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis yang berjudul, *"Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi: Studi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003".* Penelitian tersebut ditulis oleh Abdul Karim Lubis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah mengakomodir lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa kebijakan pemerintah era reformasi terkait pendidikan Islam dengan mengakomodir berbagai macam lembaga-lembaga keislaman adalah murni berasal dari kebijakan pemerintah itu sendiri, tanpa terdapat lobi-lobi, intervensi atau kepentingan-kepentingan tertentu.

Kedua, Tesis yang berjudul, *" Politik Islam di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Departemen Agama Pada Masa A. Mukti Ali.* Penelitian tersebut ditulis oleh Fendi Teguh Cahyono UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kebijakan politik yang pernah di buat oleh Departemen Agama Selama Masa A. Mukti Ali. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia melalui Departemen Agama dilindungi serta diperjuangkan hak nya sebagai warga negara mulai dari aspek pendidikan islam serta diakuinya lembaga-lembaga keislaman di Indonesia sebagai bagian dari pemerintah sehingga antara pendidikan Islam dan pendidikan umum disetarakan.

Dari penelitian terdahulu tersebut, ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam segi judul. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada, karena penulis akan meneliti tentang bagaimana bentuk kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam masa KH. Abdul Wahid Hasyim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan (policy research). Menurut Riant Nugroho, "Penelitian kebijakan adalah penelitian dengan objek suatu kebijakan tertentu. Penelitian kebijakan dapat dikelompokkan menjadi, yaitu: Pertama, penelitian untuk kebijakan, dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik sebagai suatu kebijakan baru ataupun kebijakan revisi. Kedua, penelitian tentang kebijakan, yaitu penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan, termasuk di dalamnya bagaimana kebijakan dikendalikan, baik dari sisi monitoring, evaluasi, maupun penggajarannya; kinerja kebijakan, termasuk dinamika di dalamnya, dari sejak *output* atau keluaran, atau hasil yang dirasakan serta dinikmati oleh publik dan umpan balik kepada organisasi publik; dan lingkungan kebijakan, baik lingkungan kebijakan pada saat perumusan, implementasi, maupun pada waktu kebijakan berkinerja".[8]

Jenis penelitian kebijakan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tentang kebijakan, yaitu penggunaan pendekatan dan strategi penelitian dalam ranah kebijakan terkait dengan perumusan kebijakan, rumusan kebijakan, desiminasi kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, lingkungan kebijakan, dan dampak

[8] Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan.[9] Penelitian kebijakan sangat beragam. Menurut Nusa Putra dan Hendarman, "Keberagaman itu berakar pada kenyataan banyak pendekatan dan strategi penelitian yang digunakan untuk dan dalam penelitian kebijakan."[10]

Melihat banyaknya fokus masalah dalam penelitian tentang kebijakan, maka dalam penelitian ini hanya fokus pada rumusan dan dampak dari sebuah kebijakan.

Penelitian tentang isi/rumusan kebijakan merupakan penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Menurut Nusa Putra dan Hendarman, " Rumusan kebijakan bisa dikaji dengan analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun komparatif, meta analisis dan studi banding yang bersifat historis antara rumusan kebijakan itu dengan kebijakan sejenis dalam rentang waktu tertentu."[11]

Penelitian kebijakan memiliki beberapa metode-metode penelitian diantaranya adalah sintesa terfokus, analisis data sekunder, eksperimen lapangan, metode kualitatif, metode survei, penelitian kasus, analisis biaya-keuntungan, analisis keefektifan biaya, analisis kombinasi, penelitian tindakan, dan penelitian grounded.[12]

Melihat dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk

---

[9] Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 77.
[10] Ibid., 81.
[11] Ibid., 82.
[12] Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.[13]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bercorak historis – faktual,[14] karena mengarah pada pengambilan kebijakan masa lalu. Serta deskriptif-analisis[15] yaitu dengan memberikan gambaran secara utuh tentang kebijakan dalam pengembangan pendidikan Islam. Kemudian dianalisis berdasarkan konsep dan prinsip pendidikan Islam di Indonesia.

3. Sumber Data yang digunakan

a. Sumber Primer

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[16]

Sumber data dalam penelitian ini dibagi sumber data primer dan sekunder.

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak memakai perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.[17]

---

[13] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 60.
[14] Anton Barker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), 136.
[15] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, Cet. Ke-7, 2002), 198.
[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 129.
[17]Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan. Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peraturan Menteri Agama No 3, tgl. 11 agustus 1950 tentang jawatan pendidikan Agama.
2) Undang-Undang Pendidikan Tahun 1950 (R.I. No. 4/1950) tentang penyeimbangan ilmu agama dan umum.
3) Surat Edaran Menteri Agama No. 277 / C. C-9, tanggal 15 agustus 1950 tentang berdirinya sekolah guru agama.
4) Peraturan Pemerintah No. 34, tgl. 14 agustus 1950 tentang berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN).

b. Sumber Sekunder

Data sekunder, menurut Sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen.[18]

1) Aboebakar Atjeh, Sedjarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar, Jakarta: Panitya Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957.
2) Shofiyullah MZ, K.H.A. Wahid Hasyim Sejarah, Pemikiran, dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa, Jombang: Pesantren Tebu Ireng, 2011.
3) Saiful Umam, Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik, Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI, 1998.

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru), Jakarta, 2005.

5) Departemen Agama, Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, 2005.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk menggali atau mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan. Sugiyono menjelaskan, "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan kebijakan."[19]

Dalam pengumpulannya langkah-langkah yang ditempuh:

1) Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder.
2) Melakukan pemilihan data terkait penelitian terhadap data yang dikumpulkan.
3) Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan sistem pembahasan yang telah direncanakan,

[19] Ibid., 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, bahwa tanya jawab (wawancara) harus dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[20]

Lexy J. Moleong menyatakan, "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yakni yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yakni yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu."[21] Dalam hal ini yang menjadi terwawancara adalah orang yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang pernah dibuat kementerian agama masa KH.A. Wahid Hasyim.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah kita peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 131.
[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi*. 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[22]

Di dalam penelitian ini digunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis historis (*history analysis*) dalam menganalisis data. Teknik analisis isi dalam penelitian ini adalah dengan memahami isi/rumusan kebijakan kementerian agama masa KH. Abdul Wahid Hasyim untuk dicari pengembangan terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia dengan menggunakan teori *continuity and change*.

Untuk melaksanakan teknik analisis isi tersebut, maka langkah-langkah yang digunakan adalah dengan menyeleksi data yang relevan, menyusun item secara spesifik, menjelaskan data, sehingga dari kegiatan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang penelitian ini.

Sedangkan analisis historis dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah gambaran informasi data yang menyeluruh didasarkan atas fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Analisis historis juga juga diperuntukkan sebagai penggambaran permasalahan dari sebuah pertanyaan yang perlu dicari kebenarannya, proses tersebut kemudian di evaluasi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kemudian disajikan berdasarkan fakta-fakta yang bersangkutan dalam suatu kerangka yang interpretatif.[23]

---

[22] Sugiyono, *Metode*, 244.
[23] Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab Kesatu: Terdiri dari pendahuluan yang berisi gambaran secara keseluruhan meliputi, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Terkait dengan kebijakan kementerian agama tentang pendidikan Islam di Indonesia, yang dipaparkan secara logis: A. sejarah berdirinya Kementerian Agama, B. kebijakan kementerian agama, terdiri dari pengertian kebijakan dan kebijakan kementerian agama tentang pendidikan Islam di Indonesia masa pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan masa reformasi. C. pendidikan islam di Indonesia, terdiri dari pengertian pendidikan Islam dengan sub bab pengertian pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, urgensi pendidikan Islam. Selanjutnya pendidikan Islam di Indonesia dengan sub bab kurikulum pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Bab Ketiga: tentang biografi menteri agama KH. Abdul Wahid Hasyim meliputi latar belakang keluarga, riwayat pendidikan KH.A. Wahid Hasyim, aktivitas organisasi dan pemikiranya KH. Abdul Wahid Hasyim terdiri dari bidang pendidikan Islam, bidang sosial dan bidang politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat: tentang A. kebijakan menteri agamaKH. Abdul Wahid Hasyim dalam pengembangan pendidikan Islam, B. Langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam mengembangkan pendidikan Islam, C. Keberlanjutan kebijakan pendidikan Islam masa KH. Abdul Wahid Hasyim dengan masa sekarang.

Bab Kelima: berisi penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama

Sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya pada zaman pendudukan Jepang telah diadakan Kantor Urusan Agama. Kantor ini bermaksud melanjutkan adanya kantor *Adviseur voor inlandsche zaken* bentukan Belanda, kantor ini mempunyai dua macam pekerjaan: *pertama*, memberikan pertimbangan dalam masalah ke-Islaman dan *kedua*, menjalankan penyelidikan dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan politik Islam. Mula-mula Jepang bermaksud untuk memakai dasar yang dua tadi untuk kantor agama. Akan tetapi maksud itu tidak dapat dilanjutkan, karena politik dikalangan umat Islam menuju perkembangan.

Ketika Republik Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, kabinet disusun sesuai dengan ketentuan yang lazim, dengan tidak mempunyai Kementerian Agama. Pada waktu orang berpegang pada teori, bahwa agama harus dipisahkan dengan Negara. Di dalam pemerintahan tidak boleh diadakan kementerian tersendiri yang mengurusi soal-soal agama. Namun, di dalam prakteknya berlainan banyak soal-soal agama yang secara nyata di dalam masyarakat. Seperti soal perkawinan, pendidikan keagamaan, haji dan lain-lain. Sebelum perang dunia II,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan seperti itu terpisah-pisah, ada yang diurusi departemen yustisi, ada yang diurus departemen dalam negeri dan ada yang diserahkan kepada kepala daerah. Jadi, dalam prakteknya urusan-urusan agama tercampur dengan urusan Negara. Maka setelah berjalan dari Agustus sampai November 1945, yang pada mulanya persoalan agama sudah tercampur dengan persoalan Negara dan bahkan sudah terintegrasi, maka dirasa perlu untuk membentuk departemen yang secara konsen mengurusi agama. Oleh karena itu, pada saat pembentukan kabinet parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama demikian ini merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari Negara (Sekuler) dan teori persatuan Negara dengan agama (integrasi).[24]

Pada waktu sistem presidensil antara 2 September 1945 – 14 November 1945. Wahid Hasyim diangkat menjadi menteri Negara. Kementerian Agama pada saat itu belum dipikirkan sehingga selama pemerintahan berlangsung belum ada Kementerian Agama. Awal mula ketika Syahrir menjadi ketua KNIP, dilangsungkanlah sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat yang waktu itu merupakan parlemen sementara Indonesia. Pada tanggal 25-27 November 1945, untuk mendengarkan keterangan pemerintah yang bertempat di ruangan bagian atas Fakultas Kedokteran di Salemba Jakarta.

Sebagai anggota-anggota sidang KNIP yang mewakili daerah dari karesidenan Banyumas adalah KH. Abu Dardiri, H. Moh. Saleh Suaidy

[24] Evi Fatimatur Rusydiyah, "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH.A. Wahid Hasyim", *Al-Ibroh*, Vol. 2, No.1 (Mei, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan M. Sukono Wiryosaputro yang semuanya dari Masyumi. Mereka mengusulkan supaya Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama dibebankan kepada kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan saja, tetapi harus dikelola oleh kemeterian agama secara khusus dan tersendiri.

Usulan tersebut mendapat sambutan serta dikuatkan oleh Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi, N. Kartosudarmo dan lain-lain. Maka tanpa pemungutan suara ternyata setelah terlihat PJM Presiden memberi isyarat maka Wakil Presiden Moh. Hatta berdiri dan menyatakan bahwa "adanya kementerian agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah".

Maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengumumkan bahwa kementerian agama didirikan tersendiri dengan menteri agamanya bernama H. Rasyidi, B.A.

Dalam pidatonya yang diucapkan di Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada tanggal 17-18 Maret 1946 diuraikan oleh menteri agama pertama itu akan sebab-sebab dan kepentingannya pemerintah Republik Indonesia mendirikan kementerian agama. Diantaranya ditegaskan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap UUD BAB XI Pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan kementerian agama adalah mengurus segala hal yang bersangkut-paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Dengan adanya kementerian agama, maka hal-hal yang mengenai keagamaan dan pekerjaan yang tadinya diurus oleh beberapa jawatan untuk selanjutnya akan dikerjakan oleh kementerian agama.

Maklumat kementerian agama No. 2 tanggal 23 April 1946 menetapkan bahwa:

1. Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah yang selanjutnya ditempatkan dibawah kementeria agama.
2. Hak untuk mengangkat penghulu *Landraad* (sekarang bernama pengadilan negeri), ketua dan anggota *Raad* agama yang dahulu ada dalam tangan Residen, selanjutnya diserahkan kepada kementerian agama.
3. Hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada dalam tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada kementerian agama.[25]

B. Kebijakan Kementerian Agama

1. Pengertian Kebijakan

Pembahasan tentang pendidikan tidak lepas oleh yang namanya kebijakan, karena pendidikan adalah kebijakan pemerintah yang dibuat

[25] Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wa hid Hasyim dan Karangan Tersiar* (Djakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), 595-596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang di buat pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang dalam ranah pendidikan. Kebijakan publik yang dimaksud disini adalah "keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan".[26]

Kebijakan (*policy*) secara kata merupakan turunan dari bahasa Yunani, Yitu "*Polis"* yang artinya kota (*city).* Kebijakan dapat bermakna bagaimana cara suatu pemerintah mengarahkan atau mengelola kegiatannya sendiri.[27]

Kebijakan publik menurut Winarno yang dikutip dalam buku Muhammad Munadi dan Barnawi adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian di atas menunjukkan hal-hal berikut.

a. Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah.
b. Aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya.
c. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

---

[26] H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan;Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 184.
[27] Syafruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan karena dengan berkembangnya informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi menjadikan masyarakat semakin kritis. Kekritisan itu akan membawa pada titik persoalan ketika sektor diluar negara tidak dilibatkan sejak awal, menjadikan kebijakan mengalami kontra produktif. Artinya kebijakan tidak memiliki pengaruh apapun di semua sektor.[28]

Menurut Wilson sebagaimana yang dikutip Riant Nugroho, kebijakan publik adalah "Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)."[29]

Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat di artikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk di laksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik di bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekruitmen tenaga kependidikan dan lain-lain.

Kebijakan publik yang di dalamnya termasuk kebijakan pendidikan dalam penyusunannya melewati tahapan yang panjang.

---

[28] Muhammad Munadi & Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2017), 17.

[29] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Winarno (2005) maupun Dunn (2003) membaginya menjadi lima tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.[30]

2. Periodesasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan Islam

a. Kebijakan Masa Penjajahan Belanda

Ekspansi bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalur perdagangan, kemudian ditambah dengan kekuatan militer. Selama zaman penjajahan Barat itu berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajah Barat di Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad.[31]

Pemerintah Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1619 M, dengan banyak perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh

[30] Muhammad Munadi & Barnawi, *Kebijakan Publik*, 19.
[31] Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin politik maupun agama dari beberapa daerah di Nusantara. Namun Belanda mampu mengatasi perlawanan mereka, sehingga sejarah kolonialisasi di Indonesia mengalami fase baru, yaitu Belanda secara politik sudah dapat menguasai Indonesia. Raja-raja didaerah masih ada, tetapi tidak dapat berkuasa penuh, baik dari segi wilayah maupun ketatanegaraan. Dengan demikian maka semua kekuasaan baik politik maupun ekonomi serta sosial budaya sudah berada di tangan penjajah. Belanda berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama, sesuai dengan prinsip-prinsip kolonialisme, westernisasi dan kristenisasi.

Gubernur Jendral Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi supaya dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut: “Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah utnuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara yang mereka buat. Dengan surat edaran tersebut, pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, mushalla dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf latin.[32]

Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden. Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (pengajian) harus minta izin terlebih dahulu pada pemerintah.

Pada tahun 1925 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan tersebut disebabkan adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdatul Watan dan lai-lain.[33]

Pada tahun 1932 M, keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah atau disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, berupa Sumpah Pemuda. Selain itu untuk mereka yang beragama Kristen di

[32] Ibid., 147-148.
[33] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama di sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Yakni bahwa pemerintah bersikap tidak memihak pada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama. Dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama (Indische Staat Regeling pasal 173 – 174).

b. Kebijakan Masa Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia-Belanda dalam perang dunia ke II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan dengan membawa semboyan : *Asia Timur Raya untuk Asia* dan semboyan *Asia Baru.*

Pada tahap pertama pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia ke II. Untuk mendekati umat Islam Indonesia mereka menempuh kebijaksanaan antara lain :

1) Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut: Kantoor Voor Islamistische Zaken yang dipimpin oleh orang-orang Orientalisten Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Shumubu yang dipimpin K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang tetapi dalam pelaksanaan tugas di pimpin oleh KH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Wahid Hasyim dan didaerah-daerah dibentuk Shumuka.

2) Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
3) Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
4) Di samping itu pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin.
5) Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.
6) Para ulama' Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Tokoh-tokoh santri dan pemuda Islam ikut dalam latihan kader militer itu, antara lain : Sudirman, Abd. Khaliq Hasyim, Iskandar Sulaiman, Yusuf Anis, Aruji Kartawinata, Kasman Singidimejo, Mulyadi Joyomartono, Wahib Wahab, Sarbini Saiful Islam dan lain-lain. Tentara Pembela Tanah Air inilah yang menjadi inti dari TNI sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut : Majelis A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Maksud dari pemerintah Jepang adalah supaya kekuatan umat Islam dan Nasionalis dapat dibina untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.

Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-murid sekolah tiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan wajar.[34]

c. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan Islam

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, penjajah tidak tinggal diam bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan Oktober 1945 para ulama' di Jawa memproklamasikan perang *jihad fisabilillah* terhadap Belanda. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang terkategori sebagai syuhada' perang.

[34] Ibid., 150-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tengah-tengah kondisi tersebut, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P & K (Depdikbud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB Dua Menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya.

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin Prof. Mahmud Yunus. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 yang isinya ialah :

1) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
2) Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat misalnya di Sumatera, Kalimantan, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umunya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.[35]

Dalam ketatanegaraan kita dinyatakan bahwa Negara berdasarkan UUD 1945. Kedaulatan di tangan rakyat yaitu di

[35] Ibid., 152-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan MPR. Sebelum dibentuknya MPR menurut UUD 1945, di Indonesia pernah dibentuk MPRS pada tahun 1959.

Dalam sidang pleno MPRS bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: (pada Bab II pasal II:I) dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: "pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas", dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

Pada tahun 1966 MPRS bersidang lagi. Suasana pada waktu itu ialah membersihkan sisa-sisa mental G. 30 S/PKI. Dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. Dengan demikian maka sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi wajib dari Sekolah Dasar ssampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Kehidupan Sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut Angakatan 66. Pada masa ini pendidikan agama makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintah dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dalam semua tingkat (jenjang) pendidikan.

Teknik pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengalami perubahan-perubahan tertentu sehubungan dengan berkembangnya cabang ilmu pengetahuan dan perubahan sistem proses belajar dan mengajar. Misalnya tentang materi pendidikan agama diadakan pengintegrasian dan pengelompokan yang lebih terpadu dan diadakan pengurangan alokasi waktu.[36]

C. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dari segi bahasa ada beberapa pengertian tentang pendidikan Islam:

a. *Al-Tarbiyah*, berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi (fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual) yang terdapat pada peserta didik, sehingga dapat tumbuh dan terbina dengan optimal, melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pada kata *al-tarbiyah* tersebut mengandung cakupan tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan proses pendidikan, yaitu

[36] Ibid., 155-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya.[37]

b. *Al-Ta'lim*, Muhammad Rasyid Ridha mengartikan *ta'lim* dengan: "proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu." Pengertian ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 31 tentang *allama* Tuhan kepada Nabi Adam as. Proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis *asma'* (nama-nama) yang diajarkan oleh Allah kepadanya.

c. *Ta'dib,* lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata karma, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. *Ta'dib* yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan.

d. *Riyadhah*, secara bahasa diartikan dengan pengajaran dan pelatihan. Menurut al-Bastani, *riyadhah* dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Pengertian ini akan berbeda jika *riyadhah* dinisbatkan kepada disiplin tasawuf, dalam tasawuf *riyadhah* berarti latihan rohani dengan

[37] Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara menyendiri pada hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah dan tafakur mengenai hak dan kewajibannya.[38]

Dari segi istilah atau terminologi pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dibuat para ahli dalam bidangnya masing-masing terhadap pengertian tentang sesuatu. Dengan demikian, dalam istilah tersebut terdapat visi, misi, tujuan yang diinginkan oleh yang merumuskannya, sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, kecenderungan, kepentingan, kesenangan, dan lain sebagainya.

Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam yang dicetuskan oleh para ahli:

Pertama, Muhammad SA. Ibrahim (Bangladesh) menyatakan bahwa pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian ini dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling kait mengait. Misalnya kesatuan sistem akidah, syariah dan akhlak, yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik, yang mana satu komponen sangat tergantung pada komponen lainnya. Pendidika Islam juga dilandaskan atas ideologi Islam, sehingga proses

[38] Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 18-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Islam tidak bertentangan dengan norma dan nilai dasar ajaran Islam.[39]

Kedua, Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam dengan: "Proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarny, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal. Cara mengubah tingkah laku itu melalui proses pengajaran.[40]

Ketiga, Muhammad Fadhil al-Jamali mengajukan pengertian pendidikan Islam dengan: "Upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.[41]

Keempat, hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 dirumuskan pendidikan Islam dengan: "Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi

---

[39] Ibid., 25.
[40] Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 399.
[41] Muhammad Fadhil al-Jamali, *Falsafah Pendidikan dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlakunya semua ajaran Islam.[42]" Upaya pendidikan dalam pengertian ini diarahkan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, melalui bimbingan, pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan pengawasan, yang kesemuanya dalam koridor ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, serta beberapa pemahaman yang diturunkan dari beberapa istilah dalam pendidikan Islam, seperti *tarbiyah, ta'lim, ta'dib*, dan *riyadhah*, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: "Proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, *guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat*."[43]

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal/sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan Islam terdapat enam macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik dan administrasi, psikologis, dan filosofis, yang mana keenam macam dasar itu berpusat pada dasar filosofis.[44]

---

[42] Arifin HM, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 13-14.
[43] Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan*, 28.
[44] Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: al-Husna, 1988), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar Historis

Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan, agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Dasar ini juga dapat dijadikan acuan untuk memprediksi masa depan, karena dasar ini memberi data input tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan serta maju mundurnya prestasi pendidikan yang telah ditempuh.[45]

b. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosio-budaya, yang mana dengan sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam prestasi belajar. Artinya, tinggi rendahnya suatu pendidikan dapat diukur dari tingkat relevansi output pendidikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak kehilangan konteks atau tercerabut dari akar masyarakatnya. Prestasi pendidikan hampir tidak berguna jika prestasi itu merusak tatanan masyarakat. Demikian juga, masyarakat yang baik akan menyelengarakan format pendidikan yang baik pula.

c. Dasar Ekonomi

Dasar ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali dan mengatur sumber-sumber, serta

[45] Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan*, 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab terhadap rencana dan anggaran pemmbelanjaannya. Oleh karena pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang luhur, maka sumber-sumber finansial dalam menghidupkan pendidikan harus bersih, suci dan tidak bercampur dengan harta benda yang *syubhat*.

d. Dasar Politik dan Administratif

Adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis, yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan direncanakan bersama. Dasar ini politik juga berguna untuk menentukan kebijakan umum (*ammah*) dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan hanya untuk golongan atau kelompok tertentu. Sementara dasar administrasi berguna untuk memudahkan pelayanan pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan teknis dalam pelaksanaannya.[46]

e. Dasar Psikologi

Dasar psikologi adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga administrasi, serta sumber daya manusia yang lain. Dasar ini berguna juga untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesejahteraan batiniah pelaku pendidikan, agar mereka mampu meningkatkan prestasi dan kompetensi dengan cara yang baik dan sehat. Dasar ini pula yang memberikan suasana batin yang damai, tenang, dan indah di lingkungan pendidikan, meskipun dalam kedamaian dan ketenangan itu senantiasa

[46] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dinamika dan gerak cepat untuk lebih maju bagi pengembangan lembaga pendidikan.

f. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Bagi masyarakat sekuler, dasar ini menjadi acuan terpenting dalam pendidikan, sebab filsafat bagi mereka merupakan induk dari segala dasar pendidikan. Sementara bagi masyarakat religius, seperti masyarakat Muslim, dasar ini sekadar menjadi bagian dari cara berpikir di bidang pendidikan secara sistematik, radikal, dan universal yang asas-asasnya diturunkan dari nilai *ilahiyah*.

g. Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam, sebab dengan dasar ini maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Konstruksi agama membutuhkan aktualisasi dalam berbagai dasar pendidikan yang lain, seperti historis, sosiologis, politik dan administratif, ekonomi, psikologi, dan filosofis. Agama menjadi *frame* bagi semua dasar pendidikan Islam. Aplikasi dasar-dasar yang lain merupakan bentuk realisasi diri yang bersumberkan dari agama dan bukan sebaliknya. Apabila agama Islam menjadi *frame* bagi dasar pendidikan Islam, maka semua tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependidikan dianggap sebagai suatu ibadah, sebab ibadah merupakan aktualisasi diri yang paling ideal dalam pendidikan Islam.[47]

3. Tujuan Pendidikan Islam

Dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, tujuan pendidikan dapat dibagi dalam enam tahapan sebagai berikut:

a. Tujuan Pendidikan Islam Secara Universal

Rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal dapat dirujuk pada hasil kongres sedunia tentang pendidikan Islam sebagai berikut. " bahwa pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, baik pada tingkat perseorang, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya."

Tujuan pendidikan Islam yang bersifat universal ini dirumuskan dari berbagai pendapat para pakar pendidikan, seperti Al-Attas, Athiyah al-Abrasy, Munir Mursi, Ahmad D. Marimba, Muhammad

[47] Ibid., 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fadhil al-Jamali Mukhtar Yahya, Muhammad Quthb, dan sebagainya.[48]

b. Tujuan Pendidikan Islam Secara Nasional

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam Nasional ini adalah tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Negara (Islam). Tujuan pendidikan Islam secara nasional dapat dirujuk kepada tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.

Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sehat jasmani, dan rohani, memiliki rasa seni, serta bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan kata-kata Islam, namun substansinya memuat ajaran Islam. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang telah terobjektivasi, yakni ajaran Islam yang telah mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut memperlihatkan tentang kuatnya pengaruh ajaran Islam ke dalam pola pikir bangsa Indonesia.

[48] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kencana, 2010), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tujuan Pendidikan Islam Secara Institusional

Adalah tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak atau raudatul athfal, sampai dengan perguruan tinggi. Misalnya, tujuan pendidikan Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu:

1) Melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional serta dapat menggunakan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dalam bidang pengetahuan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2) Mengembangkan dan menyebarluaskan studi Islam serta integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pengajaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.[49]

d. Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat Program Studi (Kurikulum)

Adalah tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan program studi.

e. Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat Mata Pelajaran

Adalah tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang terdapat pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Misalnya, tujuan mata pelajaran tafsir yaitu agar peserta didik dapat memahami, menghayati,

[49] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an secara benar, mendalam, dan komprehensif.

f. Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat Pokok Bahasan

Adalah tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya kecakapan (kompetensi) utama dan kompetensi dasar yang terdapat pada pokok bahasan tersebut. Misalnya pokok bahasan tentang *tarjamah*, maka kompetensi dasarnya ialah agar para siswa memiliki kemampuan menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an secara benar, sesuai kaidah-kaidah penerjemah.

g. Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat Subpokok Bahasan

Adalah tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya kecakapan (kompetensi) yang terlihat pada indikator-indikatornya secara terukur. Misalnya menerjemahkan kosakata yang berkaitan dengan alat-alat tulis, kosakata yang berkaitan dengan tempat tinggal dan sebagainya.[50]

4. Pendidikan Islam di Indonesia

Mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia maka harus dipahami berdasarkan periodisasinya, yaitu; *pertama*, pendidikan Islam masa kedatangan (abad 7-13 M), *kedua*, pendidikan Islam masa penyebaran (abad 13-15 M), *ketiga*, pendidikan Islam masa perkembangan (abad 16-19 M), *keempat*, pendidikan Islam masa pra-kemerdekaan (1900-1945), *kelima*, pendidikan Islam pasca

[50] Ibid., 65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan (1945-sekarang).[51] Namun munculnya sistem pendidikan madrasah baru mulai berkembang pesat keberadaanya pada periode pasca kemerdekaan (1900 – sekarang).

Namun sebenarnya madrasah merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan langgar/surau (Sumatera) dan pesantren (Jawa) yang telah ada pada periode sebelumnya. Langgar diartikan sebuah bangunan kecil dan sederhana yang ada di perkampungan muslim sebagai tempat ibadah dan kegiatan lain seperti pengajaran agama. Pengajaran agama di langgar merupakan pengajaran permulaan dan bersifat elementer. Materi yang diajarkan biasanya berupa pengenalan abjad dalam huruf Arab, atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mengikuti dan meniru bacaan guru dengan tujuan agar dapat membaca Al-Qur'an sampai tamat. Menurut Mahmud Yunus pendidikan Al-Qur'an saat itu adalah pendidikan Islam pertama yang diberikan kepada anak-anak didik, namun sebelumnya juga diperkenalkan praktek-praktek Ibadah (fiqh) mulai dari tata cara bersuci, tata cara shalat, serta akhlak yang diajarkan lewat cerita-cerita para nabi dan orang-orang shaleh.[52]

Sistem pengajaran umumnya menggunakan sistem *sorogan*, yaitu murid maju satu persatu dan masing-masing membacakan materi yang menjadi bagiannya dihadapan guru. Setelah tamat baca Al-Qur'an biasanya diadakan selamatan disebut *khatam*. Kemudian dilanjutkan ke pengajian kitab, yang mengkaji beberapa kitab dari berbagai disiplin ilmu

[51] Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III* (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1993), 181.
[52] Sutedjo Barajanegara, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: tanpa penerbit, 1956), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keislaman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan langgar telah mengenal sistem perjenjangan didasarkan pada materi pelajaran yang diberikan yaitu tingkatan rendah (pemula) dan tingkatan atas.[53] Pada masa ini langgar/surau merupakan sarana kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat dipentingkan pembangunannya oleh setiap tokoh agama Islam sebagai upaya strategis dalam penyebaran dan perluasan pendidikan agama non-formal di masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif.[54]

Di jawa dikenal dengan sistem pendidikan pesantren. Pendirian pondok pesantren tidak lepas dari kehadiran *kyai,* tokoh sentral yang menentukan maju mundur pesantren dengan sikap wibawa dan kharismanya. Selain itu juga ada murid-murid yang disebut *santri,* terbagi atasa santri mukim dan santri kalong.[55] Pengajaran yang diberikan umumnya mengenai pokok-pokok agama dalam segala cabangnya. Yang paling utama adalah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu bahasa Arab, syari'at, hadis, Al-Qur'an, ilmu kalam, dan tauhid.[56] Kitab-kitab yang dipelajari dibagi berdasarkan tingkatan (awal, menengah, atas). Oleh karena itu pesantren tradisional tidak mengenal sistem kelas. Untuk model pengajaran bersifat non-klasikal yaitu *wetonan, sorogan, halaqah*.[57] Di

---

[53] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1985), 14.
[54] L. Djumhur dan Danu Suparta, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: Ilmu, tanpa tahun terbit), 113.
[55] Santri mukim merupakan santri yang menetap dan tinggal di asrama pesantren. Santri kalong merupakan santri yang datang ke pesantren hanya untuk belajar dan tidak menetap di pesantren.
[56] Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bakti, 1980), 30.
[57] Tim Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1983), 8. Metode *wetonan* merupakan metode pembelajaran kolektif, dalam hal ini *kyai*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu pesantren juga menerapkan metode hafalan untuk materi tertentu seperti Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Seiring dengan makin banyaknya umat Islam yang terdidik, baik hasil didikan dalam negri (langgar/surau) maupun luar negeri (Timur Tengah: Cairo dan Mekkah), ditambah pengaruh gelombang pembaharuan Islam yang sangat gencar dilakukan di negeri-negeri muslim di Timur Tengah, mendorong munculnya kesadaran para pendidik Islam di Indonesia untuk melakukan perubahan-perubahan. Demikan juga sistem pendidikan Belanda yang kala itu jauh lebih maju dan lebih modern, tampaknya juga menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran baru tersebut. Para ulama mulai menyadari bahwa sistem pendidikan langgar dan pesantren sudah tidak begitu sesuai lagi, apalagi jumlah murid makin banyak. Oleh karena itu, kemudian muncul gagasan tentang melakukan pengembangan dan pembaharuan pendidikan Islam. Realisasinya sistem pendidikan madrasah yang berkembang di dunia Islam pada umumnya dan sistem sekolah yang dikembangkan pemerintah kolonial mulai dimasukkan dalam sistem pendidikan pesantren. Pada gilirannya sistem pengajaran *halaqah* bergeser ke arah sistem klasifikasi dengan unit-unit kelas dan sarana prasarana sebagaimana dalam kelas-kelas pada sekolah-sekolah.[58]

---

membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan *santri* mendengarkan dan menyimak. Jika *santri* pandai biasanya menggunakan metode *sorogan* (individual).

[58] Mahmud Yunus, *Sejarah*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata madrasah dalam bahasa Arab berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran.[59] Istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tapi juga bisa dimaknai rumah, istana, perpustakaan, surau, masjid. Dari pengertian tersebut maka jelas bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal awal abad ke-11-12 M (abad 5-6 H) yaitu sejak dikenalnya Madrasah Nizamiyah di Baghdad oleh Nizam al-Muluk seorang *wazir* dari Dinasti Saljuk. Namun di Indonesia madrasah merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20. Namun saat itu Indonesia masih berada dalam kekuasaan Belanda sehingga perkembangan madrasah sering berbenturan dengan kebijakan Belanda yang mengatur kehidupan beragama dan pendidikan Islam.

Setelah kemerdekaan madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama RI yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Madrasah swasta diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum dan diselenggarakan organisasi, yayasan, badan atau perorangan sebagai pengurus atau

[59] Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemiliknya. Seperti halnya madrasah negeri, madrasah swasta juga terdiri atas tiga tingkatan yaitu ibtidaiyah (6 tahun), tsanawiyah (3 tahun), dan ‘aliyah (3 tahun).[60]

[60] Abdul Raman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI MENTERI AGAMA KH. ABDUL WAHID HASYIM

A. Latar Belakang Keluarga

Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 juni 1914 atau bertepatan dengan tanggal 5 Rabi' al-Awwal 1333 di Jombang, Jawa Timur. Dia adalah putra K.H Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Nama yang diberikan ketika ia lahir adalah Muhammad Asy'ari, meniru nama kakeknya. Tetapi karena ia sering sakit, maka nama itu diganti dengan Abdul Wahid, nama salah seorang nenek moyangnya. [61] Selama masa kecilnya ia dipanggil oleh ibunya dengan Mudin, sedang santri ayahnya memanggil dia dengan panggilan Gus Wahid.

Melacak nenek moyang baik dari garis ayah maupun ibu, Wahid Hasyim berasal dari keluarga yang agamis. Ini berarti bahwa dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang agamis. Ibunya, Nafiqah [62], adalah anak dari Kyai Ilyas seorang kyai yang terkenal dari Pesantren Sewulan Madiun, sedangkan dari garis keturunan ayah, dia merupakan keturunan dan ulama yang sangat dihormati. Ayah, kakek dan kakek buyutnya adalah ulama yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk belajar dan mengajar ilmu agama dan yang mengilhami berdirinya pesantren di Pulau jawa. Ayah Wahid Hasyim sendiri, Hasyim Asy'ari, adalah pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Kakeknya, K.H. Asy'ari adalah pendiri

[61] Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup*, 141.
[62] Solichin Salam, *KH. Hasjim Asj'ari Ulama Besar Indonesia* (Jakarta: Djaja Murni, 1963), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren Keras di Jombang. Sedang kakek buyutnya, K.H. Usman, selain dikenal sebagai pendiri pesantren Gedang, juga dikenal sebagai ulama yang mengenalkan ajaran tarekat Naqsabandiyah di Jombang.[63]

Ayah Wahid Hasyim, K.H. Hasyim Asy'ari yang lahir pada tahun 1871 merupakan ulama yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya karena keahliannya dalam bidang agama, khususnya ilmu hadith, tetapi karena dia diakui mempunyai kekuatan supranatural. Dua hal inilah yang menyebabkan banyak santri yang tertarik untuk belajar di bawah asuhan K.H. Hasyim Asy'ari. Bahkan gurunya Kyai Kholil Bangkalan, seringkali datang menghadiri pengajiannya. Karena keluasan ilmunya, Hasyim Asy'ari dianugerahi oleh masyarakat dengan gelar Hadratus Shaikh dan dikenal sebagai wali.

Sebagaimana seorang kyai, Hasyim Asy'ari menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan agama bagi putra-putrinya dengan pertimbangan bahwa pendidikan agama sebagai elemen dasar dalam pembentukan kepribadian yang baik. Semenjak kecil, Wahid Hasyim belajar langsung di bawah bimbingan ayahnya. Selain belajar bahasa Arab, dia juga mempelajari pelajaran lainnya, misalnya membaca al-Qur'an sehabis dhuhur dan maghrib. Membaca al-Qur'an merupakan pelajaran umum yang diajarkan di Indonesia sebagai tahap awal dan sistem pembelajaran di pesantren.[64]

---

[63] Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia, Survey History Geografis dan Sosiologis* (Bandung: Mizan, 1992), 168.
[64] Achmad Zaini, *K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam* (Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011), 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

Sebagai anak seorang tokoh terkemuka, Abdul Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintah Hindia Belanda. Dia lebih banyak belajar autodidak. Selain belajar di pondok pesantren dan madrasah, dia banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Beliau mendalami syair-syair berbahasa Arab serta menguasai maknanya dengan baik.

Sejak usia lima tahun Wahid Hasyim sudah pandai membaca kitab suci al-Qur'an. Pada usia 7 tahun, ia mulai belajar kitab *Fathul Qarib, Minhajul Qawim, Mutammimah* pada ayahnya, dan pada usia ini pulalah, beliau sudah khatam membaca al-Qur'an dan mulai belajar di Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng.

Pada usia 12 tahun, setamat dari Madrasah, ia sudah membantu ayahnya mengajar adik-adik dan anak-anak seusianya. Ia mengajari adiknya, A. Karim Hasyim kitab *'Izi* di malam hari. Pada masa itu pula, ia giat mempelajari ilmu-ilmu kesusastraan bahasa Arab. Cara belajarnya sebagian besar dengan kekuatan *muthala'ah* dan membaca sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia membaca dan berpikir yang sejak kecil sudah tertanam dalam sanubarinya.[65]

Pada usia 13 tahun, ia dikirim ke Pondok Siwalan Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Di pondok ini ia mempelajari kitab-kitab *Bidayah, Sullamut Taufiq, Taqrib,* dan *Tafsir Jalalain*. Ternyata, di sana

[65] Mohammad Rifa'i, *Wahid Hasyim: Biografi Singkat 1914-1953* (Jogjakarta : Garasi, 2009), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia hanya bertahan sebulan. Dari Siwalan, ia pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi, di pesantren ini dia mondok hanya dalam waktu yang singkat, hanya beberapa hari saja.

Dengan berpindah-pindah pondok dan *nyantri* hanya dalam hitungan hari itu, Wahid Hasyim seperti hanya berkepentingan dengan keberkahan sang guru, dan bukan ilmunya. Soal ilmu, mungkin dalam pikirannya, bisa dipelajari dimana saja dan dengan cara apa saja. Akan tetapi, soal memperoleh berkah adalah masalah lain, harus berhubungan dengan kiai. Ini kemudian memungkinkan Wahid hasyim sewaktu belajar di pondok pesantren hanya dalam hitungan hari dan sering berpindah tempat.

Sepulang dari Lirboyo, Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi malah tinggal di rumah. Oleh ayahnya KH. Hasyim Asy'ari, pilihan Wahid Hasyim untuk tinggal di rumah dibiarkan saja, toh Wahid Hasyim bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Itu dibuktikan oleh beliau selama berada di rumah. Semangat belajarnya tidak pernah padam. Pembuktian lain tentang pola belajar dan hasilnya sangat bagus adalah, meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, namun pada usia 15 tahun ia sudah mengenal huruf latin dan menguasai bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri.[66]

Di dalam bukunya, Barton (2002:31) menyebutkan bahwasannya sang ibu, Nafiqah, sangat berperan atas pengetahuan dan keahlian Wahid Hasyim terhadap bahasa asing. Bahkan, disebutkan dalam buku tersebut, sang ibu tidak berharap anaknya ini tinggal di dunia pesantren di pedesaan.

Oleh karena itu, ia pun meminta seorang Eropa yang bekerja sebagai manajer di pabrik gula setempat untuk mengajar putranya bahasa Inggris dan Belanda. Hal tersebut bisa dijadikan modal Wahid Hasyim untuk bisa masuk menjadi elite perkotaan.

Pada 1931 ia mulai mengajar kitab *Ad-Durarul Bahiyah* dan *Kafrawi* di muka pelajar-pelajar di malam hari, dan kadang-kadang Ia diminta untuk berpidato jika ada rapat umum. Sementara itu pada 1932, ketika usianya menginjak 18 tahun, ia pergi ke Makkah. Kepergiannya di samping menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Makkah ditemani oleh saudara sepupunya, Muhammad Ilyas, yang kelak menjadi Menteri Agama.

Muhammad Ilyas memiliki jasa besar dalam membimbing Wahid Hasyim sehingga tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Muhammad Ilyas dikenal fasih dalam bahasa Arab. Di Makkah wahid Hasyim banyak

[66] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergaul dengan bermacam-macam orang dari berbagai bangsa. Hal ini menjadikan beliau berpikir secara luas, terbuka, dan tidak fanatik dalam menghadapi suatu persoalan. Wahid Hasyim juga meyakini jika ajaran Islam dapat mencapai kemajuan dan persatuan, yang akan dapat membawa manusia kearah perdamaian.

Setelah kembali dari Makkah, Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan pembaharuan di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan politik. Ini sebenarnya adalah proses belajar yang terus menerus dan ditingkatkan tingkatannya, yaitu belajar di lapangan dalam kenyataan. Begitu pula proses membaca, menulis, berpidato, dan mendidik pun ditingkatkan sambil berjalan dan menjalani kehidupannya.[67]

C. Aktivitas Organisasi

1. Perjuangan di NU

Dalam karir dan perjuangannya di NU, Wahid Hasyim tidak langsung menjadi tokoh penting. Beliau memulai karir dan perjuangannya di tubuh NU dari bawah sekali. Karirnya di NU dimulai sebagai penuis ranting NU Cukir, kemudian dipilih menjadi ketua NU Jombang, dan kemudian pada tahun 1940 beliau menjadi anggota PBNU bagian Ma'arif (pendidikan).

Dalam memajukan organisasi ini, Wahid Hasyim melakukan reorganisasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas madrasah-

[67] Ibid., 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah milik NU di seluruh Indonesia. Bukan saja mengenai jumlah madrasahnya, pemilihan gurunya, daftar, batas pengajarannya, dan tata usaha, tetapi juga sampai kepada macam-macam pengajaran dan pengetahuan baru, yang dianggapnya sebagai senjata bagi perjuangan umat Islam di masa yang akan datang. Pengajaran-pengajaran dan pengetahuan baru tersebut dipilih dan dimasukkannya ke dalam madrasah-madrasah agama itu.

Pada 1941 beliau menerbitkan media *Suluh NU* dan dipimpinnya sendiri. Media ini digunakan untuk menyalurkan paham-paham baru dalam dunia pendidikan Islam. Selain itu, sewaktu masih memegang pimpinan bagian ma'arif di PBNU, beliau menggunakan segala kesempatan ini untuk mengatur urusan pendidikan dan pengajaran dalam NU.

Pada 1946 Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Tanfidiyyah PBNU menggantikan Kiai Achmad Shiddiq yang meninggal dunia.[68] Pada masa kepeimpinannya pulalah, NU di gerakkan bukan hanya pada bidang peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, tetapi juga ikut berkiprah dalam perjuangan politik. Dari sinilah, pada 1939 atas nama wakil NU, ia membawa NU bergabung dalam MIAI sebuah perkumpulan dari berbagai organisasi Islam dalam satu wadah. Hal ini diwujudkan dengan dipilihnya beliau sebagai Ketua MIAI. Jadi, pada usia 25-26 beliau sudah menjadi ketua pergerakan dengan

[68] Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup*, 161-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skala nasional dalam dua organisasi. Hal itu juga yang kemudian membuat beliau dipercaya lagi oleh NU sebagai wakil BPUPKI, KNIP, maupun Masyumi.

Beliau pula yang ketika NU keluar dari Masyumi ikut berani mati-matian-matian membelanya walaupun sebelumnya diusahakan agar pertentangan itu tidak semakin jauh. Beliau kemudian bertanggung jawab dalam membesarkan NU yang kemudian menjadi partai politik sendiri dengan menjadi ketua partai NU. Kemudian, beliau melebarkan jaringan NU dengan mendirikan Liga Muslimin Indonesia setelah merekrut Perti, PSII maupun Al-Irsyad.[69]

2. Perjuangan di Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Kiprah Wahid Hasyim dalam organisasi MIAI ini bisa dikatakan penting selain karena kepribadiannya yang terbuka, mudah bergaul, pengetahuan yang luas, dan kepandaiannya, juga karena pengaruh ayahnya, K.H. Hasyim Asyari, yang sebenarnya ditunjuk oleh para ulama dan para pemuka Islam kala itu menjadi pemimpin organisasi tersebut. K.H. Hasyim Asy'ari menerima dirinya ditunjuk sebagai penasehat MIAI, tetapi pendelegasian dan pelimpahan tugas-tugas atas kepemimpinan organisasi tersebut dilimpahkan kepada anaknya Wahid Hasyim.

Wahid Hasyim masuk ke dalam MIAI dan berkiprah di sana ketika MIAI mengadakan kongres pada 1939. Dalam kongres itu, beliau

[69] Mohammad Rifa'i, *Wahid Hasyim*, 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpilih sebagai ketua, mewakili NU. Kiprah Wahid Hasyim dalam organisasi ini adalah menjaga persaudaraan antar-umat Islam bisa dilakukan dengan konsekuen. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kesamaan ketimbang perbedaan di antara golongan, aliran, dan perbedaan mazhab Islam di Indonesia.

Persatuan sangat diutamakan karena kondisi umat Islam di Indonesia berada dalam penjajahan. Penjajahan itu membuat aspek sosial dan ekonomi Indonesia carut-marut. Jadi, jika rakyat Indonesia tidak bersatu, maka kita akan mudah diadu domba. Selain itu, Wahid Hasyim juga mengupayakan bagaimana pendidikan bisa dijadikan agenda pemberdayaan dan merumuskan bagaimana sikap politik kita kepada penjajah berkaitan dengan proses peralihan penjajahan dari Belanda ke Jepang yang berhubungan langsung dengan Perang Dunia I dan II.

Kiprah Wahid Hasyim dalam organisasi ini relatif tidak banyak. Pada tahun 1941 beliau mengundurkan diri dari MIAI melalui pengajuan surat pengunduran diri ke PBNU dan kemudian PBNU mengurus tindak lanjutnya, dengan alasan ia dipanggil ayahnya mengasuh pesantren Tebuireng karena sang ayah sudah lanjut usia. Pada saat itu, ia sudah merangkap tiga jabatan, yaitu Ketua MIAI, Ketua Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Ketua bagian Ma'arif NU.[70]

[70] Ibid., 64-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perjuangan di Masyumi

Masyumi berdiri saat diadakan Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta, 7-8 November 1945 yang dihadiri oleh banyak tokoh dan organisasi Islam di Indonesia. Pada kongres ini diputuskan bahwa umat Islam membentuk Masyumi sebagai wadah perjuangan politik umat Islam. Selain itu, Masyumi juga digunakan sebagai alat persatuan dan persaudaraan umat Islam di Indonesia.

Pada awal berdirinya organisasi ini hanya terdiri dari empat organisasi, yaitu NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Pada 1948 Persis bergabung dengan Masyumi, kemudian Al-Irsyad pada 1950, dan terakhir bergabung juga organisasi lokal di Sumatera Utara, Al-Jami'atul Washliyah dan Al-Ittihadiyah, Pusa (Aceh).[71]

Wahid Hasyim menyadari bahwasanya organisasi Masyumi adalah alat penjinak Jepang terhadap gerakan politik Islam. Untuk itulah, sejak masuk ke Masyumi, Wahid Hasyim kemudian mencari para pemuda untuk menyelamatkan organisasi ini agar tidak sekedar menjadi alat propaganda Jepang semata-mata. Dalam hal ini ia mengajak Natsir, Harsono Cokroaminoto, Prawoto Mangkusasmito dan Zainul Arifin. Perekrutan ini untuk meminimalisasi pergerakan romusha secara massal.

---

[71] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965* (Bandung : Mizan, 2000), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa menjelang kemerdekaan Wahid Hasyim pindah ke Jakarta karena banyak tenaga dan pekerjaan yang harus dicurahkannya di ibukota. Bisa dikatakan pada tahun inilah fase politisnya dimulai. Apalagi, pada 1945 beliau menjadi ketua Masyumi. Organisasi ini bisa dikatakan adalah partai politik Islam terbesar di Indonesia saat itu.

Kiprah Wahid Hasyim dalam Masyumi juga bisa dilihat dari susunan kepengurusan Masyumi dari periode ke periode. Misalnya, pada periode 1945 dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Masyumi, Wahid Hasyim menjadi Ketua Muda II bagian Majelis Syuro yang ketua umumnya adalah ayahnya, K.H. M. Hasyim Asy'ari. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, ayahnya tersebut banyak melimpahkan tugasnya kepada Wahid Hasyim.

Kemudian, pada 1949 terjadi perubahan kepengurusan Pimpinan Pusat Masyumi, yaitu beliau meghilangkan kepengurusan Majelis Syuro. Pada tahun ini, Wahid Hasyim menjadi salah satu anggota pimpinan pusat Masyumi. Hal ini dilanjutkan kembali pada 1951. Pada kedua periode inilah NU mengalami perselisihan kemudian berlanjut perpecahan dengan Masyumi dan akhirnya memutuskan keluar dari Masyumi.[72]

Selama menjadi Menteri Agama dalam kapasitasnya mewakili aspirasi politik Islam Masyumi, Wahid Hasyim memperjuangkan

[72] Ibid., 107-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspirasi umat Islam dan demi kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang. Wahid Hasyim memperjuangkan bidang pendidikan dengan mendirikan berbagai perguruan tinggi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Yogyakarta, Aceh, Jakarta, dan lai sebagainya.

D. Pemikiran-Pemikiran KH.A Wahid Hasyim

1. Bidang Pendidikan

Di dalam dunia pendidikan, Wahid Hasyim mengerti pentingnya membangun sebuah dasar pendidikan atau filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini sebagai dasar kita membangun sebuah pendidikan bangsa Indonesia akan diarahkan ke mana. Di sinilah Wahid Hasyim menekankan pentingnya pendidikan ketuhanan atau filsafat ketuhanan sebagai dasar merancang pendidikan bangsa Indonesia.

Pilihan pendidikan ketuhanan ini penting bagi Wahid Hasyim tidak lain karena dasar negara bangsa atau perjuangan kemerdekaan kita juga berdasarkan nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan perlu ditanamkan sebagai nilai perjuangan pendidikan atau ruh pendidikan itu agar semangat pendidikan tidak menjadi semangat materialis, tetapi bernilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mulia dan bermartabat.[73]

Pentingnya pendidikan bagi proses kemajuan bangsa juga sering diungkapkan Wahid Hasyim dalam setiap pidatonya. Seperti diketahui bersama, pada saat menjabat Menteri Agama, Wahid Hasyim

[73] Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup*, 805.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan beberapa Perguruan Tinggi Islam di beberapa kota besar di Indonesia. Dalam setiap pendirian universitas atau perguruan tinggi tersebut, Wahid Hasyim menekankan pentingnya pendidikan bukan hanya untuk kemajuan umat Islam, melainkan juga kemajuan bangsa Indonesia.

Hal itu tertuang dalam pidatonya menyambut berdirinya Universitas Islam Sumatera Utara di Medan 1952, yang berjudul "Perguruan Tinggi Islam". Satu hal yang menggembirakan di dalam pembukaan Perguruan Tinggi Islam ini Wahid Hasyim mengemukakan bahwa walaupun perguruan tinggi ini memakai nama suatu agama yang tertentu, yaitu Islam, tetapi di antara tenaga-tenaga yang memajukannya, baik di kalangan pengajar maupun di kalangan pelajarnya, terdapat orang-orang dari bermacam golongan agama. Kiranya ini adalah suatu permulaan yang baik bagi kebebasan berpikir bagi ikatan-ikatan perasaan yang timbul karena perbedaan kepercayaan dan agama.

Pendidikan sebagai jembatan orang menjadi bermartabat merupakan hal yang sebenarnya diinginkan oleh Wahid Hasyim. Dalam pemikirannya tentang pendidikan, jembatan tersebut membuat orang mau berubah dari bodoh kemudian belajar sehingga menjadi pintar; dari orang miskin menjadi mengerti jika kemiskinan yang dialaminya dapat berubah jika dia mau belajar, kemudian dapat mencari pekerjaan sehingga dapat lepas dari jerat kemiskinan; dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang terjajah ia kemudian mengerti kalau dijajah itu tidak enak kemudian berjuang untuk merdeka.

Inilah kemudian yang menyebabkan bahwasannya hal terpenting dalam pendidikan dapat disarikan dalam satu kata, yaitu *berpikir*. Ini sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu "bacalah". Dari *bacalah* kemudian *berpikirlah*, maka akan menghasilkan *bekerjalah*. Tiga pola ini jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi inti kehidupan seseorang yang sudah berpendidikan.

Pentingnya berpikir ini tidak lain karena Wahid Hasyim menilai banyak masyarakat masih dikungkung oleh perasaan sentimen, rasa minder, dan rasa curiga tanpa mau berpikir lebih luas dalam bekerja dan akhirnya menyempitkan lingkup pengetahuannya hanya seperti itu-itu saja. Jika ini dibiarkan bukan saja menghambat kehidupan orang itu dan menghambat kemajuan agama Islam, melainkan menghambat kemajuan bangsa.

Padahal jelas-jelas agama Islam menyuruh kita untuk berpikir keras dan terbuka. Tidak lain karena dengan berpikir keras dan terbuka menjadikan manusia bergerak dan bekerja lebih keras dan tidak mudah putus asa. Dengan beripikir keras dan terbuka itu kemudian menjadikan diri manusia menjadi manusia yang berjasa dan berkarya, tidak hanya meminta, tetapi juga memberi bagi kemajuan dirinya, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterbukaan, kemerdekaan, dan kemanusiaan merupakan tema inti pemikiran Wahid Hasyim tentang pendidikan. Dengan pendidikan manusia terlepas dari kebodohan. Dari pendidikanlah manusia terlepas dari penjajahan. Konsep pendidikan Wahid Hasyim yang terbuka itu kentara sekali dalam dimasukkanya sistem belajar bersama dan bermusyawarah dalam sistem pendidikan di pesantren dan dalam pendidikan Islam dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Untuk itulah, pendidikan baginya harus dapat menghilangkan rasa ketakutan, menumbuhkan keberanian diri setiap individu, dan menciptakan mental yang kuat dan otak yang berkualitas.[74]

2. Bidang Politik

Pemikirannya tentang politik dapat dilihat dari cara pembacaanya atas perkembangan politik masa pendudukan Jepang. Menurutnya masyarakat dan kalangan pergerakan Indonesia dibagi menjadi tiga golongan, baik itu semasa penjajahan Jepang sampai Indonesia mencapai kemerdekaan, kemudian Indonesia mengalami masa mempertahankan kemerdekaan dari hasrat menjajah kembali pihak Belanda dan sekutunya.

Ketiga golongan masyarakat dan pergerakan tersebut adalah nasionalis, nasionalis Islam, dan komunis/sosialis. Ketiga pembagian ini sebenarnya bisa dikerucutkan menjadi dua, yaitu golongan lunak dan kelompok radikal. Penggolongan ini merupakan hasil analisis

[74] Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim*, 121-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pengamat politik atau politisi modernis yang suka mengklasifikasikan. Analisis ini sungguh menarik jika menengok latar belakang Wahid Hasyim yang berasal dari kalangan tradisional, yaitu seorang santri.

Identitas sebagai santri ini menunjukkan jika Wahid Hasyim adalah tokoh kalangan tradisional, santri yang mampu menembus batas identitas social dan tradisinya, namun tidak dijadikannya modern kebarat-baratan. Wahid Hasyim masih mengromati tradisi dan menjalankan tradisi yang saat itu masih dianggap baik.

Wahid Hasyim menilai bahwa penjajahan Jepang menciptakan sistem pemerintahan diktator. Dalam pemerintahan tersebut, yang berkuasa adalah militer Jepang yang tidak memberi kebebasan di waktu damai, apalagi perang kepada pemerintahan sipil dalam hal ini seluruh warga Indonesia. Pada masa ini di dalam masyarakat terdapat tiga aliran, yaitu nasional, nasional Islam, dan komunis/sosialis.[75]

Kelompok ini relatif bertahan dan kalaupun mengalami perkembangan dan perubahan, tidaklah mencolok, tumpah tindih terkadang terjadi, dan hanya nasionalis Islam yang radikallah yang relatif stabil. Dari sinilah Wahid Hasyim kemudian berkesimpulan bahwasannya sejak proklamasi hingga sekarang ada dua macam sikap politik, yaitu keras (radikal) dan lunak (loyal). Pihak radikal berpendirian menuntut pengakuan kemerdekaan tanpa kompromi

[75] Abu Bakar Atjeh, *Sedjarah Hidup*, 698.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Belanda. Pihak loyal sebaliknya, yaitu dengan jalan kompromi. Pihak radikal, sejak penyusunan pemerintahan sehabis proklamasi telah kalah dan terus-menerus terdesak.

Selain mengamati kondisi politik nasional, Wahid Hasyim juga mengamati perkembangan politik global (dunia). Perkembangan itu dapat diakses olehnya karena pergaulannya yang luas, juga karena ia suka membaca dan berlangganan majalah, baik dari Eropa maupun Timur Tengah.

Wahid Hasyim mengamati perkembangan politik Indonesia, khususnya kondisi politik Islam saat itu. Pengamatan itu dibuktikan dalam artikelnya yang berjudul "Umat Islam Indonesia Dalam Menghadapi Perimbangan Kekuatan Politik Daripada Partai-Partai dan Golongan-Golongan". Artikel ini menunjukkan bentuk refleksi politik Islam di Indonesia tempat Wahid Hasyim juga menjadi salah satu politisnya, baik memakai kendaraan organisasi Masyumi ataupun kemudian NU.

Wahid Hasyim menengarai bahwa partai Islam saat itu sedang mengalami perkembangan yang tidak sehat atau ibarat gajah yang sedang bengkak dan menderita sakit beri-beri. Penyakit tersebut sepertinya tidak diperhatikan betul untuk kemudian diobati. Susunan kalimat artikel itu sebenarnya merupakan sindiran terhadap gerakan partai Islam yang sedang mengalami perpecahan, tetapi pimpinannya kurang responsif dan mengamati aspirasi semua golongan. Tentunya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya golongan tertentu yang diajak bicara sementara golongan lain dimatisurikan perannya dalam partai politik Islam tersebut.

Dalam artikel tersebut, jelas menunjukkan bahwa partai Islam, dalam hal ini Masyumi, sedang mengalami perselisihan internal. Wahid Hasyim mencoba melakukan mediasi dengan jalan melokalisasi konflik yang terjadi hanya pada orang yang berkonflik saja, lalu dibicarakan dengan baik-baik solusinya, dan jangan sampai konflik tersebut merembet ke massa bawah yang tidak mengerti apa-apa soal politik.[76]

3. Pemikirannya tentang Agama

Bagi Wahid Hasyim, agama dihadirkan ke muka bumi itu untuk kebaikan seluruh penghuninya karena di dalam agama diajarkan bagaimana menolong satu sama lain, bagaimana kita tidak boleh bersikap sombong terhadap orang miskin karena harta kita hanyalah titipan. Hal itu ditengarai kemunculan setiap nabi dengan membawa agamanya atau peraturan dan kalam Tuhan selalu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang bobrok secara moral dan menuju jurang kehancuran.

Begitu pula konteks kelahiran Nabi Muhammad Saw. Kelahiran Nabi Muhammad itu sebenarnya bukanlah hanya untuk umat Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajarkan bagaimana sikap tolong menolong dan

[76] Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim*, 100-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan sikap benci dan saling memaafkan satu sama lain. Muhammad hadir di tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang selalu mengagung-agungkan hidup materi, bergaya hidup hedonis, merendahkan derajat kaum lemah, orang miskin, janda, hamba sahaya, dan anak yatim.

Jadi, konteks memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw, adalah menempatkan bagaimana inti ajaran sebuah agama, terutama agama Islam, tidak lain adalah persaudaraan manusia. Dari sinilah kemudian Wahid Hasyim mengaitkan perayaan hari lahir Nabi Muhammad Saw, dengan kondisi bangsa yang saat itu setelah lepas dari penjajahan. Nabi Muhammad Saw memberikan contoh bagaimana beliau bisa melindungi dan menghargai pemeluk agama dan suku lain dalam Piagam Madinah yang menunjukkan pentingnya persaudaraan manusia.

Untuk itu, berdasarkan agama Islam dam perilaku yang disuriteladankan Nabi Muhammad kepada kita, yaitu bagaimana menjaga kemerdekaan ini dengan menjaga rasa persaudaraan ini untuk bergerak bersama dan membangun bersama dan bukan memanfaatkan satu sama lain demi kepentingan diri sendiri.[77]

Bagi Wahid Hasyim, Islam bukan sekedar menghargai akal dan otak yang sehat, melainkan juga menganjurkan orang supaya menyelidiki, memikirkan, dan mengupas segala ajaran Islam. Hal itu

[77] Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup*, 677-679.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianjurkan Islam karena Islam memberikan ajaran-ajaran yang sehat-sehat, Islam tahu bahwa ajaran-ajaranya adalah tahan uji, karenannya tidak takut jika ajaran-ajaran Islam itu diselidiki orang, apalagi takut nanti kalau sudah diselidiki digunakan untuk menghancurkan agama Islam dari dalam.

Yang menjadi inti pemikiran Wahid Hasyim tentang agama adalah dikaitkan dengan konteks umat beragama. Itu karena agama mengajarkan dan menyuruh manusia terutama umat Islam harus mampu mengemong seluruh masyarakat dengan mengesampingkan latar belakangnya. Manusia Muslim tidak boleh hanya mementingkan kepentingan umat Islam sementara pada saat yang sama merugikan pemeluk agama lain.

Kemudian, dalam ajaran agama Islam, manusia ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah, manusia dibekali oleh Tuhan jasmani, rohani, dan akal yang harus digunakan secara tepat, terutama dalam memperlakukan alam. Manusia di muka bumi adalah makhluk sosial yang hendaknya menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Selain itu, manusia adalah makhluk individual yang harus mampu menghidupi diri sendiri. Artinya, setiap manusia harus mampu membekali dirinya dengan keterampilan yang bersifat praktis, sebagai bekal dalam mengarungi hidupnya. Oleh karenannya, otak atau nalar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering dikemukakan dalam ajaran manusia selain untuk belajar juga untuk menjalani kehidupan.[78]

[78] Aziz Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik Indonesia Jilid I II* (Yogyakarta: Kutub, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KH. ABDUL WAHID HASYIM

A. Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pada Masa KH. Abdul Wahid Hasyim

1. Menyeimbangkan Ilmu Agama dan Umum

Wahid Hasyim dikenal sebagai seorang yang mencurahkan perhatiannya dalam menyeimbangkan pengetahuan umum dan agama. Selain mendirikan PTAIN, hal tersebut juga diimplementasikan dalam bentuk lain, yakni memberikan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Menyusul ditetapkannya UU Pendidikan No. 4/1950, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama pada 1951, yang intinya menegaskan bahwa pelajaran agama harus diajarkan di sekolah umum. Selain itu, keputusan bersama ini juga menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama dianggap telah memenuhi wajib belajar.

Keputusan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan) dan No. K.I/651. Tanggal 20 Januari 1951 (Agama) merupakan realisasi dari UU Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 Ayat 2: Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dengan dimasukkannya pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah umum ini menunjukkan bukti betapa Wahid Hasyim menganggap pentingnya pendidikan keagamaan.

Jika dalam bidang keilmuan dirumuskan upaya peintegrasian yang menyatukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum, maka penyatuan itu hendaknya tidak hanya mencakup dengan memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum dan mata pelajaran umum ke pesantren dan madrasah karena hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang memperhatikan pengembangan seluruh aspek-aspek manusia dalam satu kesatuan yang utuh tanpa kompartementalisasi, tanpa terjadinya dikotomi.

Kemudian dalam rangka kesatuan sistem agar secara teknis tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum diwujudkan melalui kebijaksanaan Wahid Hasyim untuk memasukkan tujuh mata pelajaran di lingkungan madrasah, yaitu mata pelajaran membaca-menulis (latin), berhitung, Bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olahraga.

Kebijaksanaan tersebut, kemudian lahir Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dalam Pasal 10 Ayat 2 disebutkan bahwa: “Belajar di sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar".[79]

Selanjutnya kebijakan tersebut berkembang ketika KH. Moh. Ilyas menjadi Menteri Agama setelah Wahid Hasyim yaitu dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) 8 tahun. Tujuannya diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa, yaitu untuk kemajuan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak, perkembangan hati dan keterampilan tangan atau *Three H (heart, head, hand).*

2. Berdirinya Sekolah Guru Agama Islam

Mula-mula rencana ini hanya dijalankan di Daerah Yogyakarta saja. Barulah setelah Kementerian Agama RI di Yogyakarta digabung dengan Kementerian Agama RIS di Jakarta dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama No. 10 A.11/2/2175 tanggal 10 Agustus 1950, maka Menteri Agama Wahid Hasyim ketika itu hendak menjalankan rencana tersebut ke seluruh Indonesia. ini tercermin dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 277/C/C-9 tanggal 15 Agustus 1950 yang menganjurkan agar setiap daerah karesidenan di Indonesia membuka Sekolah Guru Agama Islam (SGAI), dengan perubahan nama, yaitu SGAI diubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Sekolah Guru Hakim Agama

[79]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam (SGHAI) diubah menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA).

Pengaruh surat edaran ini ternyata sangat besar, terbukti kemudian PGA berkembang pesat dan dapat dijumpai, tidak hanya di tiap Karesidenan, tapi hampir tiap kabupaten. PGA tersebut adalah:

a. PGAN di Tanjung Pinang, Sumatera Tengah didirikan pada 31 Mei 1951.
b. PGAN di Kotaraja, Aceh didirikan pada 14 Agustus 1951.
c. PGAN di Padang didirikan pada 16 Agustus 1951.
d. PGAN di Banjarmasin didirikan pada 16 Agustus 1951.
e. PGAN Tanjung Karang, Sumatera Selatan didirikan pada 16 Agustus 1951.
f. PGAN di Bandung didirikan pada 2 Agustus 1951
g. PGAN di Pamekasan didirikan pada 8 Agustus 1951.

Dengan hadirnya PGA ini diharapkan dapat mengahsilkan guru agama yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya sebagai tenaga profesional. Dengan makin banyaknya lulusan PGA di samping Madrasah Aliyah, tentu saja yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, maka semakin banyak pula kebutuhan akan IAIN, karena bagaimanapun IAIN merupakan tempat yang tepat bagi mereka. Untuk pembinaan dan pengembangannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berhimpun dalam satu wadah Persatuan Pendidikan Guru-Guru Agama seluruh Indonesia.[80]

3. Berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

Keinginan sebagian pemimpin Islam di negeri ini untuk memiliki lembaga perguruan tinggi sendiri sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai Islam sudah tumbuh menjelang periode akhir era kolonialisme, lebih-lebih setelah melihat kiprah para tamatan lembaga perguruan tinggi yang diprakarsai pemerintah penjajah.

Kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan pusat pemerintah Republik Indonesia, diberi penghargaan dengan menetapkan kota Yogyakarta sebagai kota universitas. Karena telah didirikannya Universitas Gajah mada yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950. Maka dengan itu kepada umat Islam diberikan pemerintah pula Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 dan di tanda tangani oleh Presiden RI bertanggal 14 Agustus 1950. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. K/I/14641 tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/Kab. Tahun 1951 (Pendidikan Tertanggal 1 September 1951).

[80] Mulyanti, "Pembaruan Pendidikan Islam KH.A. Wahid Hasyim, 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PTAIN berasal dari fakultas Agama dari Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Dengan demikian Universitas ini tidak mempunyai fakultas Agama lagi. Hanya tersisa fakultas Hukum, fakultas Ekonomi dan fakultas Pedagogik (Pendidikan).[81]

B. Langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Mengembangkan Pendidikan Islam

1. Reformasi Pendidikan di Pesantren Tebuireng sebagai Pilot Project Modernisasi Sistem Pendidikan Pesantren

Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1889. Sebagaimana institusi pendidikan Islam tradisional di tanah air, Tebu Ireng memfokuskan pada mata pelajaran agama, dengan memberikan perhatian kepada mata pelajaran hadist, dan menggunakan metode *bandongan* dan *sorogan* dalam proses pembelajaran di kelas. Adanya kemiripan dalam kurikulum dan metode yang digunakan di Pesantren dikarenakan adanya pola tradisi pendidikan yang sama saat itu. Biasanya kyai belajar di bawah bimbingan guru yang sama baik di pesantren maupun ketika melanjutkan studinya di Timur Tengah. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan bahwa hampir semua pesantren di tanah air, khususnya di Jawa, mengikuti pola yang sama meskipun berbeda dalam spesialisasi mata pelajaran yang diajarkan. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa institusi pendidikan tradisional resisten

[81] Mulyanti, "Pembaruan Pendidikan Islam KH.A. Wahid Hasyim (Menteri Agama RI 1949-1952)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas FITK, Jakarta: 2011), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap segala bentuk perubahan baik dari segi metodologi maupun mata pelajaran yang diajarkan.

Berkaitan dengan metode yang digunakan, di samping *sorogan* dan *bandongan*, Hasyim Asy'ari juga mengenalkan metode musyawarah (seminar). Di bawah bimbingan Hasyim Asy'ari secara langsung, hanya santri senior yang diizinkan mengikuti kelas seminar ini. Tujuan dari kelas ini selain memperdalam pengetahuan santri tentang Islam, juga mencari alternatif pemecahan masalah keagamaan dan keduniaan yang dihadapi oleh masyarakat dengan berdasar ajaran Islam.

Perubahan yang paling monumental di Pesantren Tebuireng terjadi ketika Wahid Hasyim kembali dari Mekkah pada tahun 1933. Wahid Hasyim mulai aktif dalam proses belajar mengajar di Tebuireng. Sebagai asisten ayahnya, dia mengajukan beberapa usulan pembaruan pendidikan di sana, di antaranya metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar, tujuan atau harapan santri belajar di pesantren dan pengenalan mata pelajaran dari Barat.

Mengenai keefektifan metode yang digunakan di pesantren, Wahid Hasyim mengusulkan untuk mengadopsi sistem tutorial, sebagai ganti dari metode *bandongan*. Menurutnya, metode tersebut sangat tidak efektif dalam mengembangkan inisiatif santri.[82] Hal ini dikarenakan dengan metode *bandongan*, santri datang hanya untuk mendengar,

[82] Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimashada Press, 1993), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menulis dan menghafal pelajaran yang diberikan, tidak ada kesempatan bagi santri untuk mengajukan pertanyaan atau bahkan mendiskusikan pelajaran. Wahid Hasyim secara jelas menyimpulkan bahwa metode *bandongan* membuat santri pasif.

Wahid Hasyim juga mengusulkan agar kebanyakan santri yang datang ke pesantren tidak berharap menjadi ulama. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam mempelajari ilmu agama. Mereka dapat memperoleh ilmu agama dan buku-buku yang ditulis dengan huruf latin, dan menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dibarengi dengan kemampuan menguasai keterampilan yang berguna secara langsung di tengah masyarakat di mana mereka berada. Hanya sebagian kecil saja yang memang disiapkan menjadi ulama yang diajari bahasa Arab dan karya-karya klasik dari abad pertengahan. Hasyim Asy'ari tidak setuju dengan dua usulan tersebut dengan alasan bahwa usulan tersebut terlalu radikal dan sangat bertolak belakang dengan pemikiran pesantren saat itu.[83] Akan tetapi Hasyim Asy'ari mengizinkan putranya untuk mendirikan institusi baru yang didirikan pada tahun 1935.[84] Institusi tersebut dapat dikategorikan sebagai reformasi pendidikan yang paling monumental di dunia pesantren pada waktu itu, lebih khusus di Pesantren Tebuireng.

---

[83] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1994), 106.
[84] Aboebakar atjeh, *Sedjarah Hidup KH.A. Wahid Hasyim*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengambil nama dan institusi pendidikan yang dibangun oleh pemimpin Saljuk, Nizam al-Mulk pada tahun 1092, Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Wahid Hasyim dengan pertimbangan bahwa terbatasnya pelajaran yang diberikan di pesantren membuat santri sulit bersaing dengan kolegannya yang belajar dengan menggunakan sistem Barat. Kelemahan santri, menurutnya adalah kurangnya penguasaan terhadap ilmu-ilmu Barat, bahasa asing dan keterampilan.[85] Dengan dibekali beberapa keterampilan sebagaimana disebut di atas, santri akan mampu bersaing untuk memperebutkan posisi penting di masyarakat.

Berbeda dengan sistem tradisional yang masih terus berjalan di pesantren Tebuireng, institusi baru yang didirikan oleh Wahid Hasyim menggunakan ruang kelas dengan kurikulum 70 % pelajaran umum dan 30 % pelajaran agama. Pelajaran umum yang diajarkan di Madrasah Nizamiyah adalah aritmatika, sejarah, geografi dan ilmu pengetahuan alam. Sebagai tambahan santri diajari pelajaran bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris dan Belanda. Keterampilan mengetik juga diberikan untuk meningkatkan kualitas santri.[86]

Pembaruan pendidikan yang digagas oleh Wahid Hasyim tidak luput dari kritik yang tajam dari para ulama dan masyarakat. Ide pembaruan Wahid Hasyim sering menjadi sasaran kritik yang dilontarkan ulama sebagai upaya mencampuradukkan ajaran agama

[85] Ibid., 151.
[86] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang suci dengan ilmu-ilmu keduniawian yang mana ilmu-ilmu sekuler tersebut masih dianggap sebagai produk bangsa kolonial. Pada akhirnya, walaupun memakan waktu yang cukup lama, Wahid Hasyim mampu meyakinkan mereka akan manfaat yang dapat diperoleh dengan ide pembaruannya tersebut. Setiap ada kesempatan, dia selalu menggunakannya untuk menjelaskan tujuan dan keuntungan dari ide pembaruannya. Melalui upaya penyadaran tersebut, kyai dan masyarakat secara perlahan dapat memahami dan menerima gagasan Wahid Hasyim tersebut.

Sebagai bukti penerimaan ide pembaruan pendidikan Wahid Hasyim, jumlah siswa yang ingin belajar di pondok Pesantren Tebuireng dan Madrasah Nizamiyah meningkat secara dramatis. Pada tahun 1930-an, jumlah siswa Tebuireng sebanyak dua ribu, jumlah tersebut adalah sepuluh lipat dari jumlah siswa yang belajar di Tebuireng sepuluh tahun sebelumnya.[87]

Keberhasilan Madrasah Nizamiyah sebagai *pilot project* dalam memodernisasi pesantren merupakan langkah awal bagi Wahid Hasyim dalam mengembangkan reformasi pendidikan di kalangan kaum tradisional. Sejak beberapa kyai mengadopsi sistem madrasah di pesantrennya, kurikulum yang diterapkan bervariasi disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh pesantren tersebut dan tersedianya guru. Oleh karena itu Wahid Hasyim mengambil inisiatif untuk

[87] Ibid., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat standar kualitas madrasah secara keseluruhan sebagai upaya reorganisasi sistem madrasah baik secara administratif dan strukturnya.

2. Pelaksanaan Pengajaran Agama di Sekolah

Setelah terlibat dalam perpolitikan beberapa tahun, khususnya pada masa Jepang dan masa perang kemerdekaan, Wahid Hasyim kembali berkiprah dalam dunia pendidikan, yakni terlibat dalam upaya peningkatan pendidikan umat Islam pada awal tahun 50-an. Penunjukkan Wahid Hasyim sebagai menteri agama dalam tiga kabinet, yakni kabinet Hatta, Natsir, dan Sukiman, secara terus menerus.[88] Menurut Dhofier, merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam pendidikan. Dia berargumentasi bahwa benar kementerian agama sudah ada sejak kabinet Syahrir, yang dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, akan tetapi disebabkan belum amannya situasi pada waktu itu sampai adanya pengakuan kedaulatan negara Indonesia pada bulan Desember 1949, Kementerian Agama mempunyai peran yang berarti dalam sistem pemerintahan Indonesia. Wahid Hasyimlah yang memberikan peran yang berarti.

Di antara usahanya adalah memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum pendidikan Nasional. Wahid Hasyim menyadari bahwa sejak sistem pendidikan Nasional mengadopsi sistem Barat yang hanya memfokuskan pendidikan pada pelajaran sekuler, banyak hal

[88] Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren* (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hilang dan pendidikan terutama yang berkaitan dengan nilai dan moral. Hal ini menjadi perhatiannya karena, sebagaimana disebutkan di atas, pendidikan yang menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia tidak hanya persoalan perkembangan akal atau badan dan keterampilan belaka, akan tetapi juga persoalan perkembangan spirit yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan agama. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa sistem pendidikan Nasional harus memasukkan pelajaran agama dan harus diberikan secara seimbang dengan pelajaran umum. Perdebatan mengenai apakah pelajaran agama harus diberikan di sekolah pemerintah (negeri) atau tidak, akhirnya di akhiri dengan SK bersama antara Kementerian Agama dengan kementerian pendidikan yang menyatakan bahwa pelajaran agama harus diberikan sejak kelas 4 dan sekolah menengah selama dua jam dalam seminggunya. Berkat usaha Wahid Hasyim lah dalam kabinet, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan tertanggal 21 Januari 1951, yang mewajibkan pelajaran agama harus diajarkan di sekolah umum.[89]

3. Langkah Dalam Mendirikan PTAIN

Pada pertengahan tahun 1950, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.34/1950 tanggal 14 Agustus 1950, dimulailah langkah-langkah pertama untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).

[89] Achmad Zaini, *K.H. Abdul Wahid Hasyim*, 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian atas keputusan Kabinet dibentuklah suatu panitia bernama Panitia Perguruan Tinggi Agama, kemudian diganti dengan nama Panitia Perguruan Tinggi Islam, diketuai oleh KH. Fathurrahman Kafrawi (Mantan Menteri Agama RI) dan terdiri dari 11 anggota yaitu :

a. K.H. Fathurrahman Kafrawi sebagai Ketua
b. Prof. Drs. Abdullah Sigit sebagai Anggota
c. Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo sebagai Anggota
d. Muchtar Yahya sebagai Anggota
e. Prof. Abdul Kahar Muzakkir sebagai Anggota
f. Mahmud Yunus sebagai Anggota
g. K.H. Faried Ma'ruf sebagai Anggota
h. K.H. Abdullah Effendi sebagai Anggota
i. Prof. Mr. Notosusanto sebagai Anggota
j. Mr. Rusbandi sebagai Anggota
k. M. Sulaiman sebagai Anggota

Dalam waktu tiga setengah bulan panitia tersebut menyusun "Rencana Peraturan" yang selanjutnya akan mendapat pengesahan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dengan kesempatan itu juga disusun pula rencana calon-calon anggota Dewan Pengawas (Dewan Kurator) dan calon-calon pendidiknya.

Kemudian K.H. Fathurrahman Kafrawi diberi tugas oleh Wahid Hasyim selaku Menteri Agama, untuk melaksanakan segala persiapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan keperluan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ini. Diantara hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah:

a. Gedung,
b. Sekretariat,
c. Perlengkapan,
d. Pakultet (Guru/Dosen),
e. Dewan Kurator (Dewan Penasehat),
f. Pendaftaran dan lain sebagainnya.[90]

Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendiriran PTAIN ini bukanlah jumlah yang kecil pada saat itu sebesar Rp. 548.500 (Lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Barulah pada bulan September 1951 telah selesai dibangun gedung untuk PTAIN di Yogyakarta. Gedung tersebut telah dilengkapi dengan kebutuhan yang sesuai pada masanya. Dan untuk mengisi koleksi perpustakaan PTAIN maka disediakan 2.000 buah judul buku.

Mulailah dibuka penerimaan pendaftaran mahasiswa pada tanggal 1 Juli 1951 sampai dengan 25 Agustus 1951 dan terkumpul 100 calon mahasiswa. Namun sehubungan dengan belum tersedianya Ketua Fakultas dan Dosen, maka para calon mahasiswa tersebut diadakan "penyaringan" oleh Panitia Ujian yang diketuai oleh Hertog Jojonegoro dan beranggotakan 11 orang.[91]

---

[90] Aboebakar Atjeh, *Sedjarah Hidup*, 665.
[91] Ibid., 666-669.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon mahasiswa yang berasal dari Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, seperti SGHA, SMA Negeri atau yang dipersamakan dengan Sekolah Kejuruan Sejarah SGA, STM, serta Madrasah Menengah Tinggi dengan terlebih dahulu dilaksanakan ujian.

Untuk memberikan jalan bagi pelajar-pelajar lulusan Madrasah Menengah Atas (Tinggi) yang berminat ke PTAIN namun tingkat pengetahuan umumnya kurang memadai, disediakan sekolah persiapan dengan menempuh ujian masuk dengan mata pelajaran: Pengetahuan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Bumi, Sejarah Umum dan Indonesia. Mata pelajaran di Sekolah Persiapan sama dengan mata pelajaran yang diberikan di SMA Negeri Kelas III jurusan Sastra (A) ditambah dengan pelajaran Agama Islam.

PTAIN pada tanggal 26 September 1951 telah resmi dibuka dan dihadiri oleh Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama dengan menyampaikan pidato yang berjudul "Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ".[92]

4. Pelaksanaan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI)

Sejarah munculnya Pendidikan Guru Agama (PGA), akarnya sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi dengan pendirian PGA oleh Departemen Agama, kelanjutan lembaga pendidikan Islam di Indonesia mendapat jaminan yang lebih strategis.

[92] Naskah Pidato ini dimuat dalam buku Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat semakin besarnya tugas penanganan masalah pendidikan Islam, maka bagian pendidikan dalam Departemen Agama dikembangkan menjadi Jawatan Pendidikan Agama pada tahun 1950 (ketika Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama). Badan ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis di lingkungan Departemen Agama mengingat tugas pengembangan pendidikan merupakan lahan garapan yang sangat luas dan menantang. Beberapa tokoh yang pernah menjabat posisi ini adalah Drs. Abdullah Sigit, Mahmud Yunus, Fakih Usman dan Arifin Tamyang. Hampir semua perubahan dan pengembangan pendidikan agama pada masa pemerintahan Orde Lama tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Jawatan itu kemudian disetujui oleh Menteri Agama.[93]

Sejarah PGA pada masa Orde Lama bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggungjawab bagian pendidikan.

Pada tahun 1950 itu pula, bagian dari Departemen Agama tersebut membuka dua lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai lembaga profesional keguruan:

a. Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Terdiri dari dua jenjang:

[93] Maskum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun[94] dan diperuntukkan bagi siswa tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
3) Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) ditempuh selama 4 tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Terdiri dari 4 bagian:
   a) Bagian A mencetak guru kesusastraan,
   b) Bagian B mencetak guru ilmu alam dan ilmu pasti,
   c) Bagian C mencetak guru agama, dan
   d) Bagian D mencetak tenaga administrasi peradilan agama.[95]

Bagi calon guru agama pada sekolah umum ditekankan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan guru umum (lulusan Sekolah Guru Bantu) di samping memiliki pengetahuan ilmu agama. Hal ini dimaksudkan agar calon-calon guru agama tidak merasa rendah diri dan diremehkan oleh guru umum di sekolahnya. Di samping itu, dimaksudkan agar guru agama mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dapat mengajarkan agama melalui pendekatan ilmu pengetahuan

[94] Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: PT Logos Wacana lmu, 2005), 141.
[95] Maskum, *Madrasah*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Dengan kata lain, ilmu agama yang diajarkan sejalan dengan ilmu umum dan tidak menimbulkan pertentangan antara agama dan umum.

Dengan adanya rencana dua lembaga ini yang diajukan oleh Drs. Sigit secara tegas membedakan kemampuan yang harus dimiliki oleh calon guru agama pada sekolah umum dan calon guru untuk madrasah.

C. Keberlanjutan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pengembangan Pendidikan Islam Masa Sekarang

1. Keberlanjutan dari Penyeimbangan Ilmu Agama dan Umum

Setelah era Reformasi pendidikan agama di sekolah lebih diakui dengan dasar hukum yang jelas, terlebih lagi pemerintah menempatkan pendidikan agama pada posisi yang penting dalam setiap jenjang pendidikan. Hadirnya paradigma pendidikan karakter atau budi pekerti menunjukkan adanya keterkaitan dengan peningkatan pendidikan agama Islam yang dianggap sebagai mata pelajaran yang paling bertanggung jawab membentuk moral dan budi pekerti para siswa di sekolah. Hadirnya perguruan tinggi keagamaan juga ikut menyemaikan pentingnya pendidikan agama Islam terutama di sekolah-sekolah umum.

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi pendidikan Islam pada umumnya.[96] *Pertama*, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang

[96] Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren, Ma'had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan Majlis Ta'lim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikhotomi.

Undang-undang Sisdiknas merupakan keputusan yang lebih maju dari peraturan dan undang-undang sebelumnya, sebab undang-undang ini menjamin setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.[97] Di samping itu, dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia dan agama.[98]

Di samping landasan hukum berupa undang-undang, kedudukan PAI semakin kokoh dan jelas seiring dengan terbitnya berbagai peraturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nasional yang menempatkan PAI sebagai bagian dari pendidikan nasional tersebut. Dengan PP Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar, maka kedudukan dan

[97] Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12, ayat (2) a.
[98] Penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 36, ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar semakin jelas, karena pendidikan agama menjadi isi kurikulum wajib pada pendidikan dasar. PP tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama. Kedua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berisi ketentuan pelaksanaan PP nomor 28 tentang pendidikan dasar. Ketentuan-ketentuan peraturan tersebut secara yuridis formal memperkokoh dan memperjelas kedudukan PAI di sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar, di samping jaminan bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.

Demikian juga dengan PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah yang berisi Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan Menengah, maka kedudukan dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum pada jenjang pendidikan Menengah menjadi semakin kokoh dan jelas. Pelaksanaan PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dalam peraturan pemerintah maupun Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut secara tegas menempatkan pendidikan agama sebagai isi kurikulum. Untuk kelangsungan proses pendidikan diperlukan ketersediaan tenaga kependidikan guru. Ketentuan tentang tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependidikan telah ditetapkan dengan PP Nomor 38 tentang Tenaga Kependidikan yang mengatur pengadaan Tenaga Kependidikan. Peraturan Pemerintah tentang tenaga kependidikan tersebut, secara yuridis memberikan jaminan ketersediaan tenaga kependidikan oleh pemerintah, termasuk tenaga pendidikan di bidang pendidikan agama di sekolah umum.[99]

2. Keberlanjutan dari Adanya Sekolah Guru Agama Islam (SGAI)

Sekitar tahun 1978-1992 Departemen Agama melakukan penataan kembali terhadap keberadaan PGAN 6 Tahun, sehingga menjadi susunan sebagai berikut: kelas 1,2,3 PGA menjadi Madrasah Tsanawiyah, sedangkan 4, 5, 6 menjadi PGA. Dengan demikian, setelah adanya reorganisasi, PGAN 6 tahun menjadi PGAN 3 tahun. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 19/1978.

Ada beberapa pertimbangan akademis yang melatarbelakangi perubahan PGAN 6 tahun menjadi PGAN 3 tahun. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan PGA 4 tahun ditemukan beberapa kelemahan, yaitu ; *pertama*, materi keguruan di PGA 4 tahun hanya dua jam pelajaran yang diberikan di kelas 4, yaitu Ilmu Mendidik satu jam dan Psikologi satu jam. Materi keguruan tersebut jelas kurang memadai untuk lembaga pendidikan yang sejak awal dirancang untuk mencetak calon guru. *Kedua*, dari sisi usia, lulusan PGA 4 tahun berada dalam kisaran usia 17-19 tahun. Secara psikologis, usia ini berada dalam masa pubertas

[99] Tasman Hamami, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Sebagai Keharusan Sejarah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 (Februari, 2004), 187-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum waktunya menjadi guru yang semestinya memiliki kematangan emosi dan kepribadian. *Ketiga*, secara umum materi pelajaran yang diberikan di PGA 4 tahun tidak jauh berbeda dengan materi pelajaran Madrasah Tsanawiyah, kecuali pada penambahan jam dan tambahan sedikit ilmu keguruan.

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, maka lebih tepat apabila PGA 4 tahun dialihfungsikan menjadi Madrasah Tsanawiyah (dengan masa belajar 3 tahun). Sedangkan sisa tahun ke empat pada PGA 4 tahun perlu digabung ke PGA bagian atas (kelas 5 dan 6), sehingga masa belajar PGA menjadi tiga tahun setelah MTs. Dengan komposisi demikian, PGA 3 tahun dipandang cukup memadai untuk menghasilkan calon-calon guru agama sekolah dasar pada masa itu.

Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan pada PGA 6 tahun pun juga terdapat kelemahan, yaitu; *pertama*, PGA 6 tahun yang diselenggarakan dari kelas 1 sampai kelas 6 di satu sekolah akan menghadapi suatu kenyataan bahwa pada sekolah ini akan terkumpul anak-anak antara umur 12/13 tahun sampai dengan 19/20 tahun, anak-anak usia pra-pubertas dan usia mengakhiri pubertas yang memiliki perbedaan-perbedaan perkembangan psikis dan sosial. Oleh karena itu, secara tidak disadari di PGA 6 tahun akan terlihat adanya pengelompokan murid berdasarkan persamaan perkembangan tertentu seperti umur pada kelas 1 s/d 3 dan umur pada kelas 4 s/d 6. *Kedua*, pada PGA 6 tahun, anak selama 6 tahun terkungkung dalam situasi tertentu. Hal demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasakan sangat membosankan. Keadaan lain yang sering terlihat pada PGA 6 tahun ini selain kebosanan situasi, ialah adanya perasaan "terlanjur/salah pilih" karena penerimaaan murid untuk sesuatu kejuruan tertentu yang dimulai terlalu muda (umur 12/13 tahun). Anak semuda itu harus menentukan pilihan profesinya. Mestinya pilihan menjadi guru merupakan panggilan batin. Dan ini dapat dilakukan apabila telah melampaui umur pra-pubertas, bukan setelah tamat sekolah dasar.

Pada tahun 1992, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42/1992. Pemerintah melakukan alih fungsi PGAN 3 tahun menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Alih fungsi ini dilakukan setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 28 ayat 3 undang-undang ini menyebutkan bahwa "pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan". Lembaga pendidikan tenaga keguruan Islam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38/1992.[100] Adalah tentang Fakultas Tarbiyah atau satuan pendidikan sejenis. Dengan demikian, berdasar ketentuan di atas, maka pengadaan tenaga guru termasuk guru agama tidak lagi disiapkan melalui pendidikan jenjang menengah, melainkan lewat jenjang pendidikan tinggi. Khusus calon guru agama maka lembaga pendidikan tinggi yang berwenang menyiapkan adalah Fakultas Tarbiyah di perguruan tinggi agama Islam.

[100] Pada penjelasan pasal 14 (ayat 1) dan pasal 16 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan tenaga keguruan dalam ayat ini adalah Fakultas Tarbiyah atau satuan pendidikan sejenis."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keberlanjutan dari Berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh dua faktor utama. Pertama adalah faktor intern yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada tahun 1927.[101] Kedua adalah faktor ekstern yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia.[102]

Kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan.

Pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan para ulama mendirikan sebuah universitas Islam di solo. Pada tahun itu juga fakultas agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama dan kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri untuk golongan Islam yang diambil dari Fakultas Agama UH berdasarkan

---

[101] Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 444-446.

[102] Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Pada perkembangan berikutnya pada tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta sebagai gabungan antara PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta.[103]

IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN dengan cepat berkembang menjadi sebuah institut dengan empat fakultas, yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 tahun dan dapat dilengkapi dengan spesialisasi 2 tahun.

IAIN pada tahap awal berdirinya berdasarkan berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 43 tahun 1960. Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 terdiri atas Fakultas Tarbiyah sebanyak delapan jurusan yaitu: 1) Jurusan Pendidikan Agama, 2) Jurusan Paedagogik, 3) Jurusan Bahasa Indonesia, 4) Jurusan Bahasa Arab, 5) Jurusan Bahasa Inggris, 6) Jurusan Khusus (Iman Tentara), 7) Jurusan Etnologi dan sosiologi, 8) Jurusan Hukum dan Ekonomi.[104]

Perkembangan selanjutnya delapan jurusan ini mengecil dan hanya bertahan dua jurusan saja yaitu Jurusan Pendidikan Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekitar tahun 1980-an lahirlah Jurusan Tadris, jurusan ini bertujuan untuk merespon kekurangan dan kebutuhan guru-

[103] Zuhairini. Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),
[104] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru dalam pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1990-an muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam (KI).

Sebagai lembaga pendidikan tinggi di tingkat Institut, IAIN mengkhususkan pembelajaran sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setidaknya perkembangan puncak dari IAIN sebelum di antaranya beralih status memiliki lima fakultas agama yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin.

Pengkhususan ini sesuai dengan amanat PP No. 30 Tahun 1990 yang disempurnakan dengan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang membatasi ruang kerja dari sebuah lembaga pendidikan tinggi setingkat institut. Dalam Bab III Pasal 6 ayat 5 di jelaskan bahwa institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

Setelah melalui fase-fase perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia hingga kini lembaga pendidikan tersebut dapat dikategorikan kepada tiga macam:

1. Lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, yakni UIN, IAIN, dan STAIN.
2. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk universitas di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, jurusan, serta program studi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk institut dan sekolah tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad ke-20, telah ada 14 IAIN. Perkembangan dari cabang-cabang IAIN bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukan rasionalisasi organisasi. Pada tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang ada, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.

Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Cikal bakal UIN adalah IAIN yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1960 di kota Yogyakarta dengan nama IAIN Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah, yakni gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Sejak tahun 1963, berdirilah cabang-cabang IAIN yeng terpisah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pusat. Pendirian IAIN terakhir adalah IAIN Sumatera Utara di Medan pada tahun 1973.

Pada abad ke-21, sejumlah STAIN berubah ke IAIN dari IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), karena memiliki fakultas dan jurusan di luar studi keislaman. Berikut adalah daftar perguruan tinngi Islam negeri di Indonesia.[105]

NO.	INSTITUSI	NAMA
1.	STAIN	1. STAIN Bengkalis 2. STAIN Gajah Putih 3. STAIN Mandailing Natal 4. STAIN Majene 5. STAIN Sorong 6. STAIN Sultan Abdurrahman 7. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
2.	IAIN	1. IAIN Ambon 2. IAIN Batusangkar 3. IAIN Bengkulu 4. IAIN Bone 5. IAIN Bukittinggi 6. IAIN Curup 7. IAIN Datokarama 8. IAIN Fattahul Muluk 9. IAIN Jember 10. IAIN Kediri 11. IAIN Kerinci 12. IAIN Kudus

[105] https://www.wikipedia.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		13. IAIN Lhokseumawe 14. IAIN Madura 15. IAIN Manado 16. IAIN Metro 17. IAIN Padangsidempuan 18. IAIN Palangka Raya 19. IAIN Palopo 20. IAIN Parepare 21. IAIN Pekalongan
		22. IAIN Ponorogo 23. IAIN Pontianak 24. IAIN Purwokerto 25. IAIN Salatiga 26. IAIN Samarinda 27. IAIN Sultan Amai 28. IAIN Sultan Qaimuddin 29. IAIN Surakarta 30. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 31. IAIN Syekh Nurjati 32. IAIN Ternate 33. IAIN Tulungagung 34. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
3.	UIN	1. UIN Alauddin 2. UIN Antasari 3. UIN Ar-Raniry 4. UIN Imam Bonjol 5. UIN Mataram 6. UIN Maulana Malik Ibrahim 7. UIN Raden Fatah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		8. UIN Raden Intan 9. UIN Sultan Maulana Hasanuddin 10. UIN Sultan Syarif Kasim 11. UIN Sultan Thaha Saifuddin 12. UIN Sumatera Utara 13. UIN Sunan Ampel 14. UIN Sunan Gunung Djati 15. UIN Sunan Kalijaga 16. UIN Syarif Hidayatullah 17. UIN Walisongo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai kebijakan kementerian agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim, maka melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa kebijakan kementerian agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim antara lain: 1) melalui UU Pendidikan No. 4/1950, yang menegaskan bahwa penyeimbangan antara ilmu umum dan agama. Jadi, di sekolah umum terdapat muatan pendidikan agama yang diajarkan kepada peserta didik. 2) melalui Peraturan Pemerintah No. 34/1950 tanggal 4 Agustus 1950, tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dengan berdirinya STAIN dimaksudkan agar mampu mencetak sarjana-sarjana yang tidak hanya mahir dalam ilmu agama tetapi juga di bidang umum dan IPTEK. 3) melalui Keputusan Bersama Menteri Agama No. 10 A.11/2/2175 tanggal 10 Agustus 1950, tentang berdirinya Sekolah Guru Agama Islam, selain mendirikan lembaga keislaman Wahid Hasyim juga mendirikan sekolah bagi guru agama supaya tenaga pendidik yang dihasilkan memang benar-benar siap mengabdi sebagai guru dan professional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, langkah KH. Abdul Wahid Hasyim dalam mengembangkan pendidikan Islam selama menjabat sebagai menteri agama. Terkait dengan penyeimbangan ilmu umum dan agama dalam penerapannya di sekolah ilmu agama diberikan mulai dari kelas IV dan menengah dengan waktu dua jam dalam seminggu. Masuknya kurikulum umum di madrasah-madrasah dengan bobot 70 % ilmu umum dan 30 % ilmu agama. Perihal tentang pendirian PTAIN karena memang baru maka dalam hal-hal teknis disini KH. Abdul Wahid Hasyim menunjuk beberapa tokoh untuk di jadikan panitia dalam pembangunannya. Sedangkan tentang Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) ada dua jenjang, 1) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). 2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Ketiga, implikasi kebijakan pendidikan Islam pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim dengan pengembangan pendidikan Islam masa sekarang. Terkait dengan penyeimbangan ilmu agama dan umum untuk masa sekarang ini masih cukup relevan apalagi kurikulum saat ini mengacu pada pendidikan karakter yang mana merupakan ranah dari pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi sangat penting karena berkaitan dengan penanaman sikap dan moral peserta didik. Selanjutnya berkaitan dengan berdirinya STAIN untuk saat sekarang ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangannya sangat pesat, fakultas serta jurusannya pun semakin bertambah banyak selain ilmu agama juga ada ilmu umum yang tentunya di komparasikan dengan Islam. Transformasi STAIN menjadi IAIN dan untuk saat ini menjadi UIN. Berkaitan dengan adanya SGAI karena semua guru untuk sekarang ini harus berpendidikan minimal sarjana, maka SGAI sekarang berubah menjadi Fakultas Tarbiyah yang di dalamnya terdapat banyak jurusan keagamaan Islam.

B. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Meskipun sekarang ini adalah zaman dimana semua IPTEK berkembang pesat dan untuk menuju itu semua berawal dari keilmuan umum, tentunya harus tetap mengutamakan pendidikan keagamaan terlebih dahulu karena sebagai bekal peserta didik di masa depan. Seharusnya muatan pelajaran kegamaan waktu pembelajarannya perlu di tambah di semua jenjang sekolah sehingga peserta didik mampu menerima ajaran agamanya masing-masing dengan maksimal. Pelajaran agama tidak hanya seputar materi tetapi benar-benar mampu di terapkan oleh peserta didik.
2. Seiring bertransformasinya perguruan tinggi yang berbasis Islam mulai dari STAIN sampai sekarang menjadi UIN maka harus di barengi juga dengan keilmuan agama yang mendalam jangan sampe kehilangan jati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri ke-Islamanya karena banyaknya juga jurusan-jurusan umum. Seleksi mahasiswanya memang benar-benar harus ketat sehingga yang bisa mampu masuk pun pilihan dan mumpuni dibidang keagamaan dan ilmu-ilmu umum, inilah tujuan awal didirikannya STAIN yakni lembaga yang mampu mengkomparasikan ilmu agama dan ilmu umum.

3. Pemerintah harusnya membuat kebijakan terkait perekrutan guru-guru di sekolah dan madrasah, karena selama ini untuk masuk ke sebuah lembaga pendidikan hanya dibutuhkan ijazah sarjana pendidikan tanpa ada tes ataupun sebagainya.
4. Karena keterbatasan waktu, penelitian ini mungkin tidak bisa menyebutkan semuanya tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang pernah di buat oleh KH. Abdul Wahid Hasyim. Oleh karenanya, hal tersebut bisa menjadi celah bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji kebijaka-kebijakan kementerian agama dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Ahmadi & Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Ali, Mukti. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Pendekatan Teoritik dan Praktis Berdasarkan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimashada Press, 1993.

Atjeh, Aboebakar. *Sedjarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*.

Jakarta: Panitya Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957.

Danim, Sudarwan. *Pengantar Studi Penelitian* Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

_____*Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1994.

Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Irianto, Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____*Public Policy.* Jakarta: PT Elex Komputindo, 2014.

Maskum. *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, Cet. Ke-7, 2002.

Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

MZ, Shofiyullah. *K.H.A. Wahid Hasyim Sejarah. Pemikiran, dan Baktinya bagi*

Agama dan Bangsa. Jombang: Pesantren Tebu Ireng, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nata, Abuddin. *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

_____ *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Putra, Nusa dan Hendarman. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Rahardjo, Mudjia. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010.

Rahim, Husni. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: PT Logos Wacana lmu, 2005.

Shaleh, Abdul Rachman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

Syafruddin. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi sekolah Efektif.* Jakarta: Rineka Cipta,2008.

Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan;Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Umam, Saiful. *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI,1998.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Wiryokusumo, Iskandar dan J. Mandilika. *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Zuhairini. Dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Zuhri, Saifudin. *Guruku Orang-orang Pesantren*. Bandung: Al-Ma'arif, 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. JURNAL

Fendi T. Cahyono, "Kebijakan Menteri Agama K. H. Wahid Hasyim terhdap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia", *Al Achyad: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1 (September 2016).

M. Shabir U, "Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia", *Lentera Pendidikan*, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2013).

Muhammad Idrus, "Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam", *El-Tarbawi*, Vol. 1 (September, 2014).

Tasman Hamami, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Sebagai Keharusan Sejarah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 (Februari, 2004).

3. INTERNET

https://www.wikipedia.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id